

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

HSS
Semangat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kandangan, 25 Februari 2026



Hj. RAHMAWATY, S.T.,M.T.

NIP. 19710726 199703 2 005

Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sistematisasi Penulisan	3
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 4
2.1 Rencana Strategis	4
2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	6
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
3.1 Pengukuran Kinerja	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ..	93
3.4 Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2026 ..	95
3.5 Realisasi Anggaran	97
 BAB IV PENUTUP.....	 100

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD	5
Tabel 2.2 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	6
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025	10
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2025	11
Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, Capaian Tahun 2025	15
Tabel 3.3 Capaian Persentase Infrastruktur Fisik dalam Kondisi Baik Tahun 2025	16
Tabel 3.4 Capaian Program Penyelenggaraan Jalan	21
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Jalan Tahun 2025	22
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Jembatan Tahun 2025	22
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kondisi Mantap Jalan Kabupaten (2023 – 2025)	24
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Infrastruktur Fisik dalam Kondisi Baik	34
Tabel 3.9 Capaian Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	35
Tabel 3.10 Capaian SPM Urusan PU Pemenuhan Kebutuhan Air Minum sehari-hari	36
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih dari tahun ke tahun	39
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah	40
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	46
Tabel 3.14 Capaian Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW Tahun 2025	47
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW	48
Tabel 3.16 Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW	50
Tabel 3.17 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	57
Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW	59
Tabel 3.19 Formulasi Persentase Air Irigasi Tersedia	61
Tabel 3.20 Data Ketersediaan Air Irigasi	61

Tabel 3.21	Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi	62
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi dengan Targer Kinerja Jangka Menengah	63
Tabel 3.23	Realisasi Jumlah Data SDA yang telag Digitalisasi	67
Tabel 3.24	Realisasi Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air	68
Tabel 3.25	Realisasi Persentase Daerah Irigasi Terlayani	69
Tabel 3.26	Realisasi Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	70
Tabel 3.27	Capaian Kinerja perSubKegiatan pada Bidang Sumber Daya Air	71
Tabel 3.28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Air Irigasi Tersedia	85
Tabel 3.29	Data Responden	86
Tabel 3.30	Indeks Kepuasan Pegawai per Jenis Layanan	87
Tabel 3.31	Perbandingan Target dan Kinerja Indikator Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah ..	88
Tabel 3.32	Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91
Tabel 3.33	Matrik Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil AKIP Internal Tahun 2024	94
Tabel 3.34	Rencana Tindak Lanjut	95
Tabel 3.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025	97
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	98

DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 3.1 Nilai IKLI Per Kategori	12
Diagram 3.2 Sebaran Nilai IKLI Per Kecamatan	14
Diagram 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dari Tahun ke Tahun indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW	49

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	25
Gambar 3.2 Peta Sebaran Air Minum	38
Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan .	48
Gambar 3.4 Sebaran Jaringan Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan	62

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Persentase Terlayani dan Belum Terlayani Air Minum Layak Terlayani	38
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahun Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih	40
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahun Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW	49
Grafik 3.4 Nilai Survey Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Sekretariat per Unsur	87

****PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT
XXX**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2025 memiliki lima sasaran strategis dengan total lima indikator kinerja, dan lima target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap lima target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan: Terselenggaranya layanan infrastruktur yang prima, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	69.81	76.75	109.94
2	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	83.65	83.65	100
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	79.17	83.06	104.91
4	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	69.90	70.29	100.56

Sumber : ESAKP 2025

Tujuan: Meningkatnya Kualitas RB General

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	93,04	93,04

Sumber : ESAKP 2025

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp209.344.467.002 atau 66.89% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp312.952.514.016.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Bab I berisi :

- ❖ *Latar Belakang*
- ❖ *Sistematika Penulisan*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator antara lain kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Limbah

Terpadu. Adapun perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Disamping itu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam membantu tugas Kepala Dinas terdapat beberapa ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain : Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Ruang dan Pembina Jasa Konstruksi.

Adapun tugas dari masing-masing unit organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian tugas sekretariat dijabarkan dalam tiga sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- 2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4) Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- 5) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. UPTD Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas dibidang Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 ini terdiri atas 4 (empat) Bab sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014, yaitu:

- BAB I Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
- Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan Realisasi Anggaran
- Bab IV Penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II berisi :

- ❖ Rencana Strategis
- ❖ Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
- ❖ Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- ❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu

Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2025. Rencana Strategis ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2025-2029. Keberadaan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi urusan yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yakni :

Visi : Membangun Desa, Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi dan Teknologi (SEMANGAT)

Misi : Mewujudkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga turut berupaya dalam pencapaian tujuan kesatu dalam tujuan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 yakni **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan.**

Adapun penjabarannya ke dalam tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang											
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan, Lingkungan Hidup yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	Terselenggaranya layanan infrastruktur yang prima, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	78,63	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	82,06	
		Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik (%)	65,31	69,81	72,65	75,49	78,34	81,18	84,02	
		Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan masyarakat di kawasan perdesaan yang terlayani air bersih (%)	83,46	83,65	84,12	84,60	85,08	85,55	86,03	
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW (%)	78,28	79,17	81,25	83,75	85,00	87,08	88,75	
		Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia (%)	69,50	69,90	70,41	70,98	71,53	72,11	73,04	

Sumber : SIPD Renstra

2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dalam menyusun RKA tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah yang telah di rumuskan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan pemangku kepentingan, ataupun usulan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni (APBD) Murni tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki anggaran sebesar Rp284.782.278.953. Namun, karena beberapa alasan termasuk dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara agar lebih efektif dan efisien sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, maka di lakukanlah efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial. Pada masa ini, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pengurangan sebesar Rp53.488.270.325 (18,78%) sehingga menjadi sebesar Rp231.294.008.628

Kemudian pada pelaksanaan anggaran berikutnya, terdapat beberapa kali pergeseran dan penambahan anggaran, sehingga sampai dengan akhir tahun berjalan, total anggaran yang dimiliki dan akan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Hulu Sungai Selatan adalah sebesar Rp312.952.514.016. Adapun rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	11.469.546.752	11.189.462.322	34.212.370.114	
Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7.361.400	7.361.400	7.361.400	
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	9.385.265.162	9.385.265.162	9.551.989.604	

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.977.000	19.977.000	30.775.000	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	458.793.240	313.708.810	589.963.360	
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	22.569.130.800	
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	586.300.200	586.300.200	586.300.200	
Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.011.849.750	876.849.750	876.849.750	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	13.276.888.653	22.025.086.355	34.294.186.751	-
Kegiatan pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ws dalam 1 satu daerah kabupatenkota	7.414.721.525	14.077.113.155	19.324.409.425	
Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 satu daerah kabupaten kota	5.862.167.128	7.947.973.200	14.969.777.326	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.582.803.500	6.245.068.500	7.408.245.500	-
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam di daerah kabupatenkota	2.582.803.500	6.245.068.500	7.408.245.500	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.395.463.174	17.538.065.984	18.554.050.234	-
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupatenkota	3.395.463.174	17.538.065.984	18.554.050.234	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.184.358.770	2.285.358.770	3.736.658.770	-
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupatenkota	2.184.358.770	2.285.358.770	3.736.658.770	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	171.408.660.096	63.725.881.389	82.804.462.339	-
Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupatenkota pemberian izin mendirikan bangunan imb dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	171.408.660.096	63.725.881.389	82.804.462.339	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	75.195.262.185	103.559.039.485	127.515.894.485	-
Kegiatan penyelenggaraan jalan kabupatenkota	75.195.262.185	103.559.039.485,0	127.515.894.485	

Program-Kegiatan	RKA murni (Rp)	RKA efisiensi (Rp)	RKA perubahan (Rp)	Ket
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.610.760.641	3.067.510.641	2.092.050.641	-
Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	403.705.077	403.705.077	403.705.077	
Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupatenkota	134.470.730	134.470.730	134.470.730	
Kegiatan pengawasan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	3.072.584.834	2.529.334.834	1.553.874.834	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.658.535.182	1.658.535.182	2.334.595.182	-
Kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw dan rencana rinci tata ruang rrtr kabupatenkota	334.665.182	334.665.182	386.365.182	
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupatenkota	1.166.680.000	1.166.680.000	1.629.040.000	
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupatenkota	157.190.000	157.190.000	319.190.000	
JUMLAH	284.782.278.953	231.294.008.628	312.952.514.016	-

Sumber : RKA DPUTR Tahun 2025

Laporan kinerja ini, diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 di atas.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 006 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	Untuk mengetahui capaian persentase kondisi jalan dan jembatan kondisi mantab, prasarana jalan kondisi baik, akses air minum dan sanitasi layak	Rata-rata capaian persentase kondisi jalan dan jembatan kondisi mantab, prasarana jalan kondisi baik, akses air bersih layak dan sanitasi layak	Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya,
2	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	indikator ini dipilih karena mencerminkan akses masyarakat terhadap air layak konsumsi, mendukung kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah penyakit akibat air tercemar. Selain itu, indikator ini penting dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah perdesaan.	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga Se Kab.HSS dikali 100%	Kepala Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Untuk mengukur sejauh mana tata ruang yang telah direncanakan dalam RTRW diterapkan dengan benar dalam pemanfaatan ruang di daerah	(Jumlah Keterangan Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yang diterbitkan / Total Jumlah Keterangan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan) x 100	Kepala Bidang Tata Ruang dan jasa Konstruksi
4	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	Persentase air tersedia adalah indikator penting karena secara langsung mengukur jumlah air yang dapat digunakan tanaman, membantu mengelola irigasi secara efisien, dan menjadi dasar untuk perencanaan pertanian yang lebih baik.penataan ruang	(Ketersediaan Air/Kebutuhan Air) x 100%	Kepala Bidang Cipta Karya
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Jumlah persepsi layanan memuaskan dan sangat memuaskan dibagi jumlah responden X 100	Sekretaris

Sumber : E-SAKP 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bulan Januari tahun 2025. Namun, pada bulan Agustus 2025 terjadi pergantian Pejabat Tinggi Pratama, sehingga pada bulan Agustus 2025 kembali dilakukan

penandatanganan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	Persen	69.81
2	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	Persen	83.65
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Persen	79.17
4	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	Persen	69.90
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	Persen	100

Sumber : E-SAKP 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

- ❖ Pengukuran Kinerja
- ❖ Analisis Capaian Kinerja
- ❖ Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sakip tahun 2024 (matrik tindak lanjut 2024)
- ❖ Rekomendasi perbaikan Kinerja/ Rencana tindak lanjut di tahun 2026
- ❖ Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni tujuan ke 1

(satu): **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan**, dengan indikator **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur** dan target di tahun 2025 sebesar 80,50. Berdasarkan data dari hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas, ketersediaan, dan keberfungsian layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah daerah, didapatkan realisasi indikator ini di tahun 2025 sebesar 80,52. Realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,02%.

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	80,50	80,52	100,02%	BAIK

Sumber : E-SAKP 2025

Nilai 80,52 ini merepresentasikan persepsi masyarakat secara global terhadap kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana penghitungan dilakukan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari seluruh butir pertanyaan (25 unsur), bukan sekadar rata-rata dari nilai per bidang. Pendekatan ini dipilih untuk mencerminkan pengalaman publik secara utuh dalam mengakses layanan infrastruktur tanpa terkotak-kotak oleh struktur organisasi internal.

Analisis capaian ini didasarkan pada data valid dari **150 responden** dengan *Margin of Error* yang terkendali pada tingkat kepercayaan 95%. Teknik sampling menggunakan metode *Convenience Sampling* yang representatif mencakup 11

kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

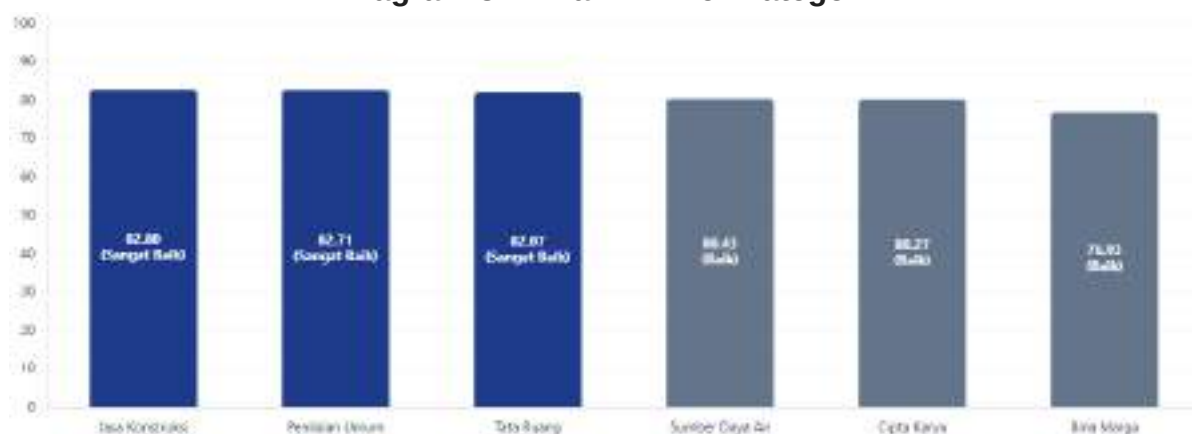
Instrumen pengukuran menggunakan Skala Likert 1-5 yang kemudian di konversi menjadi indeks skala 0-100 dengan pedoman sebagai berikut:

- 81,00 – 100,00 : Sangat Baik
- 61,00 – 80,99 : Baik
- 41,00 – 60,99 : Cukup
- 21,00 – 40,99 : Kurang
- 0,00 – 20,99 : Sangat Kurang

Ditinjau dari profil demografis, responden didominasi oleh kelompok usia produktif **20-49 tahun (80,66%)**. Dominasi kelompok usia ini memberikan bobot validitas yang tinggi pada hasil survei karena kelompok usia produktif merupakan pengguna paling aktif dari infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dalam menunjang mobilitas ekonomi harian. Sementara itu, proporsi gender yang relatif berimbang (Laki-laki 56,67% dan Perempuan 43,33%) memastikan bahwa perspektif gender telah terakomodasi dalam penilaian kualitas infrastruktur.

Meskipun secara global kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kategori "Baik", analisis mendalam dilakukan dengan membedah capaian per bidang untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan intervensi.

Diagram 3.1 Nilai IKLI Per Kategori



Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan Data Dinas PUPR Tahun 2025

Tiga bidang layanan berhasil menembus kategori "Sangat Baik" (>81,00), yaitu **Jasa Konstruksi, Penilaian Umum, dan Tata Ruang**. Tingginya nilai pada Jasa Konstruksi (82,80) dan Tata Ruang (82,07) mengindikasikan efektivitas reformasi birokrasi pada aspek regulatif dan administratif.

Masyarakat dan mitra kerja menilai bahwa:

1. **Kepastian Layanan:** Konsistensi pemanfaatan ruang (Unsur TR3: 83,07) dinilai sangat terjaga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.
2. **Kualitas Pembinaan:** Pembinaan jasa konstruksi (Unsur JK1: 82,93) dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para pelaku usaha.
3. **Persepsi Perbaikan:** Unsur Penilaian Umum (U2: 83,73) menunjukkan adanya konsensus publik bahwa layanan Dinas PUTR tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

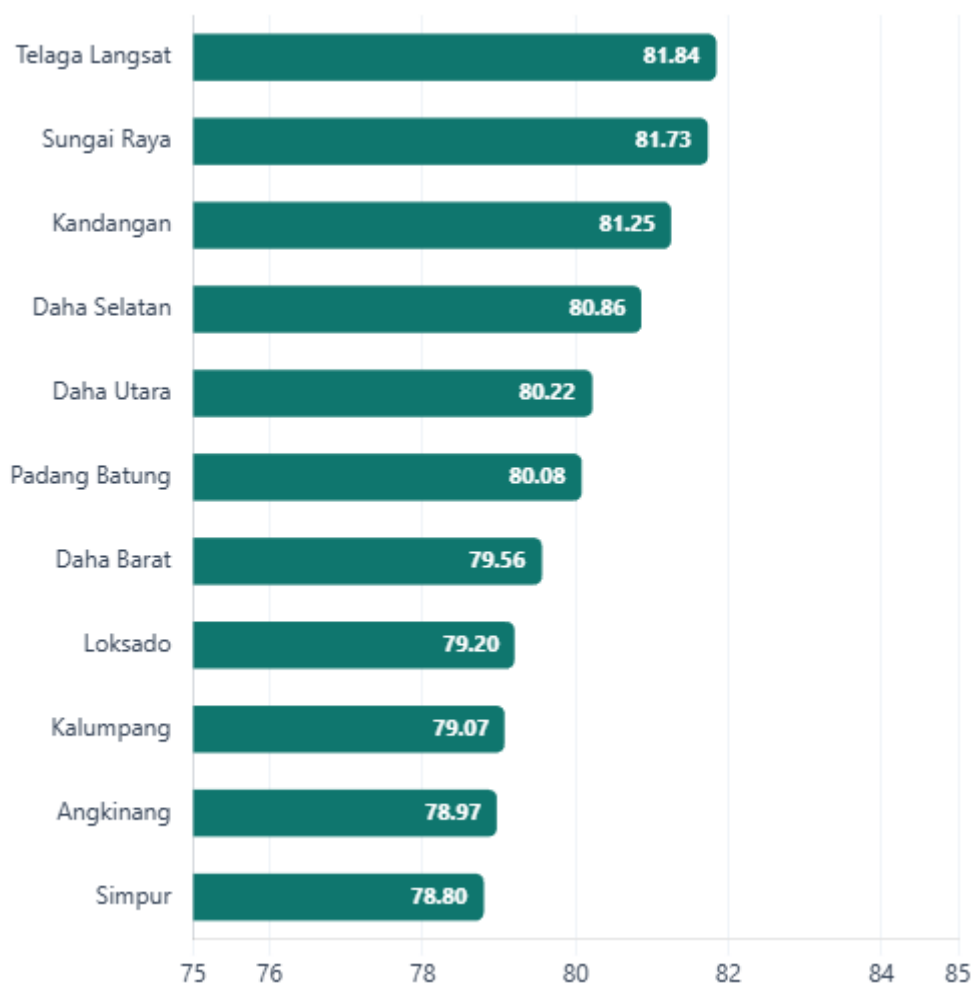
Bidang **Sumber Daya Air** dan **Cipta Karya** menunjukkan kinerja yang stabil di angka 80-an, namun Bidang **Bina Marga** tertinggal dengan skor **76,93**. Bina Marga memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan mobilitas harian masyarakat. Analisis terhadap unsur-unsur pembentuk nilai Bina Marga mengungkapkan tantangan spesifik:

- **Kecepatan Respons:** Unsur penanganan kerusakan jalan (BM3) memiliki skor terendah dari seluruh survei, yaitu **75,20**. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan perbaikan jalan ("tutup lubang") dengan realisasi penanganan di lapangan.
- **Kondisi Jembatan:** Unsur kelayakan dan keamanan jembatan (BM4) memperoleh skor **76,80**, mengindikasikan perlunya audit teknis dan pemeliharaan berkala pada struktur jembatan di titik-titik krusial.

Sebaran kepuasan masyarakat relatif merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana tidak ada satu pun kecamatan yang berada di bawah kategori "Baik".

1. **Pusat Pertumbuhan (Kandangan, Sungai Raya, Telaga Langsat):** Wilayah-wilayah ini mencatatkan skor **Sangat Baik** (di atas 81,00). Kecamatan Kandangan, dengan jumlah sampel terbesar (n=50), memiliki IKL 81,25. Hal ini wajar mengingat konsentrasi pembangunan dan aksesibilitas fasilitas pemeliharaan yang lebih dekat ke pusat kota.
2. **Wilayah Penyangga (Simpur, Angkinang, Kalumpang):** Kecamatan seperti Simpur (78,80) dan Angkinang (78,97) memiliki skor terendah, meskipun masih dalam kategori "Baik". Nilai yang berada di ambang batas bawah ini menjadi sinyal peringatan dini (*early warning system*) bagi Dinas PUTR untuk memprioritaskan alokasi pemeliharaan rutin di wilayah tersebut pada tahun anggaran mendatang guna mencegah penurunan persepsi publik menjadi kategori "Cukup".

Diagram 3.2 Sebaran Nilai IKLI Per Kecamatan



Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan Data Dinas PUPR

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mencapai target IKLI didorong oleh optimalnya layanan administratif (Tata Ruang & Jasa Konstruksi). Namun, tantangan utama ke depan adalah mempersempit disparitas antara kualitas layanan administratif dengan layanan fisik infrastruktur jalan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pengukuran Kinerja atas kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

Secara rata-rata, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar 101,69%. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	69.81	76.75	109.94 %
2	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	83.65	83.65	100 %
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	79.17	83.06	104.91 %
4	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	69.90	70.29	100.56 %
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100	93,04	93,04 %
Rata-Rata Capaian					101,69 %

Sumber : E-SAKP 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029. Semua target Indikator Kinerja Utama berhasil dicapai, meskipun ada 1 target penunjang yang capaiannya sedikit di bawah angka 100%.

Analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I **Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Fisik yang Andal dan Berfungsi Optimal**

Indikator untuk sasaran Meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal adalah **Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik**. Indikator ini menggambarkan tingkat ketercapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis atas Realisasi dengan Target Kinerja

Capaian untuk indikator Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik tahun 2025 di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	%	69.81	73,45	109.94

Sumber : E-SAKP 2025

Indikator ini diukur melalui capaian Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap, Persentase prasarana dalam kondisi baik, Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, serta Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian. Kesemua indikator tersebut adalah sebagai representasi kualitas, keberfungsian, dan keberlanjutan infrastruktur fisik yang

mendukung pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

Formulasi untuk capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik} &= \frac{(PJ+PBG+PP+PS+PTK)}{5} \\ &= \frac{(61.59+100+76.27+80.57+48.83)}{5} \\ &= 73.45\% \end{aligned}$$

Keterangan :

PJ = Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

PBG = Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik

PP = Persentase Prasarana dalam kondisi baik

PS = Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak

PTK = Persentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat

b. Analisis atas Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator dimaksud merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun ini, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat pengukuran maupun data yang dapat disajikan.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Realisasi Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik tahun 2025 tercatat sebesar 73.45%, sementara pada akhir perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di tetapkan targetnya adalah 81,18%. Terdapat deviasi sebesar 7,73 poin yang masih harus terus diupayakan pencapaiannya agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional

Dalam rangka Analisis Realisasi dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional, perlu disampaikan bahwa indikator Persentase Infrastruktur Fisik dalam Kondisi Baik pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan indikator komposit yang dibentuk dari penggabungan beberapa sub-indikator, yaitu PJ (Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik), PBG (Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik), PP (Persentase

Prasarana dalam kondisi baik), PS (Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak), dan PTK (Persentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat). Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun pada tingkat nasional telah digunakan Indeks Infrastruktur Dasar (IID), pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan digunakan Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah (IIDW), dan pada beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan juga terdapat indikator/indeks infrastruktur dengan nomenklatur tersendiri, capaian kinerja indikator dimaksud tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perbedaan konstruksi indikator, yang meliputi perbedaan komponen pembentuk, definisi operasional, metode agregasi, pembobotan, serta cakupan penilaian. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja secara lebih objektif dan akuntabel hanya dapat dilakukan pada sub-indikator yang sejenis atau melalui penyelarasan metodologi pengukuran agar diperoleh basis perbandingan yang setara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran, Persentase Infrastruktur Fisik dalam Kondisi Baik tahun 2025 terealisasi sebesar 73,45%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 69,81%, dengan capaian kinerja sebesar 109,94%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan keberfungsian infrastruktur daerah.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi Program Pemeliharaan Infrastruktur Peningkatan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan, jembatan, bangunan gedung, serta prasarana umum berkontribusi terhadap peningkatan kondisi infrastruktur yang lebih baik dan mantap.
2. Tingginya Capaian Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (100%), yang berarti seluruh bangunan gedung yang menjadi kewenangan daerah berada dalam kondisi baik, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap rata-rata capaian indikator.
3. Peningkatan Akses Sanitasi Layak (80,57%) menggambarkan Perluasan layanan sanitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi sehat turut mendukung peningkatan nilai indikator.
4. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Lebih Efektif

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta pengawasan lapangan yang lebih intensif mampu menjaga mutu hasil pekerjaan.

5. Efisiensi Penggunaan Anggaran, menunjukkan Realisasi anggaran yang efektif dengan capaian output optimal menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Meskipun target telah terlampaui, terdapat beberapa komponen yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:

- Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik yang masih berada pada angka 61,59%.
- Persentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat yang masih relatif rendah (48,83%).

Kedua aspek ini berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak ditingkatkan secara berkelanjutan.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Alokasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Memprioritaskan penanganan ruas jalan dan jembatan dengan kondisi rusak ringan agar tidak berkembang menjadi rusak berat.
2. Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Mendorong dan memfasilitasi tenaga kerja konstruksi untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi keahlian guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pekerjaan.
3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Melakukan pengawasan teknis secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik untuk memastikan mutu dan ketahanan infrastruktur.
4. Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan sanitasi.
5. Perencanaan Berbasis Data Kondisi Infrastruktur
Menggunakan data kondisi eksisting sebagai dasar dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik tidak terlepas dari pencapaian lima program yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ke lima program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Mengenai bagaimana peran program-program tersebut dalam pencapaian target Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik akan di jelaskan lebih rinci berikut ini:

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program Penyelenggaraan Jalan diarahkan untuk memastikan keterhubungan dan kelancaran pergerakan pada jaringan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari beberapa kewenangan. Jaringan jalan kewenangan kabupaten mencakup 350 ruas dengan total panjang 732,46 km, yang menjadi fokus utama penanganan dalam program ini. Selain itu, terdapat jaringan jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4 ruas dengan panjang 52,49 km, serta jaringan jalan nasional yang menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Kalimantan Selatan sepanjang 86,12 km yang terdiri dari 12 ruas.

Dalam konteks tersebut, program ini difokuskan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan kabupaten agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memastikan keterpaduan layanan dengan jaringan provinsi dan nasional. Pencapaian sasaran program diukur melalui indikator Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap, yang menggambarkan tingkat kemantapan layanan jaringan secara agregat pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi kondisi dan pemutakhiran basis data.

Pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan dihitung berdasarkan capaian kemantapan jaringan jalan dan jaringan jembatan pada akhir tahun. Pada Tahun Laporan 2025, realisasinya mencapai 61,59% dari

target 61,38% atau setara 100,34%. Realisasi anggaran sebesar Rp89.216.409.877 dari pagu Rp127.515.894.485 atau 69,96%.

Capaian ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi jaringan. Pada jaringan jalan, kemantapan dihitung berdasarkan evaluasi kondisi perkerasan akhir tahun dan hasil penanganan yang meningkatkan kondisi, termasuk overlay aspal menggunakan HRS-WC maupun HRC Base. Namun pada saat yang sama, sebagian ruas lain dapat mengalami degradasi akibat beban lalu lintas, cuaca, dan kondisi lingkungan.

Pada jaringan jembatan, kemantapan dihitung berdasarkan perubahan kondisi jembatan dalam basis data (kategori Baik dan Sedang) dengan ketentuan perhitungan hanya untuk jembatan yang memenuhi kriteria bentang minimal 6 meter dan berada pada ruas jalan kabupaten. Oleh karena itu, sebagian output penanganan pendukung (misalnya oprit, pekerjaan rutin/penggantian box, atau penanganan jembatan yang offset dari ruas) tidak seluruhnya tercermin sebagai penambahan “panjang jembatan mantap” pada indikator outcome.

Dengan demikian, capaian ini mencerminkan kondisi layanan infrastruktur jalan dan jembatan secara agregat pada akhir Tahun 2025. Secara umum sasaran program telah tercapai dan mendukung konektivitas wilayah, meskipun masih diperlukan penguatan pengendalian pelaksanaan dan optimalisasi pemanfaatan anggaran agar keselarasan antara output kegiatan dan capaian outcome jaringan semakin meningkat.

Adapun capaian Program dan Kegiatan terlihat pada tabel 3.4, 3.5, dan 3.6 berikut ini :

Tabel 3.4 Capaian Program Penyelenggaraan Jalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Tahun 2025 (Target)	Tahun 2025 (Realisasi)	Capaian
1	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap	%	61,38	61,59	100,34

Sumber : E-SAKP 2025

Kinerja program pada level kegiatan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Pada komponen jalan, sasaran kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten yang mantap dan berfungsi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang, dengan indikator kinerja Panjang Jalan Kondisi Mantap (km).

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Jalan Tahun 2025

Indikator	Sat	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Panjang Jalan Kondisi Mantap	km	472,85	483,62	102,28	112.001.515.822	80.428.012.703	71,81%

Sumber : E-SAKP 2025

Kinerja komponen jembatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota diarahkan untuk meningkatkan kondisi jembatan kabupaten yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas jaringan jalan, dengan indikator kinerja Panjang Jembatan Kondisi Mantap (m).

Kinerja komponen jembatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota diarahkan untuk meningkatkan kondisi jembatan kabupaten yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas jaringan jalan, dengan indikator kinerja Panjang Jembatan Kondisi Mantap (m).

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Jembatan Tahun 2025

Indikator	Sat	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Panjang Jembatan Kondisi Mantap	m	2.124,20	2.130,00	100,27	15.514.378.663	7.306.879.700	47,10%

Sumber : E-SAKP 2025

Realisasi anggaran sebesar Rp7.306.879.700 dari pagu Rp15.514.378.663 atau 47,10% menunjukkan bahwa capaian outcome jaringan jembatan telah tercapai. Namun demikian, struktur belanja tahun berjalan tidak sepenuhnya terealisasi karena terdapat pekerjaan penggantian/penanganan jembatan yang dibatalkan akibat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, serta rencana kegiatan pendukung berupa pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan

yang tidak dapat direalisasikan pada Tahun 2025. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya serapan anggaran, meskipun tidak mengurangi capaian indikator Panjang Jembatan Kondisi Mantap yang dihitung berdasarkan perubahan kondisi jembatan dalam basis data.

Capaian indikator program (% mantap) bersifat agregat jaringan yang menggambarkan tingkat layanan kemantapan pada akhir tahun berdasarkan hasil survei/evaluasi kondisi dan pemutakhiran basis data. Sementara itu, indikator kegiatan disajikan dalam satuan fisik (km/m) dan melekat pada ruang lingkup paket atau lokasi penanganan tertentu. Perbedaan karakter indikator tersebut menyebabkan hubungan antara output kegiatan dan capaian indikator program tidak selalu linier.

Pada jaringan jalan, pelaksanaan penanganan (rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala/rutin, serta overlay) dapat meningkatkan kondisi pada ruas yang ditangani, sehingga berpotensi menambah panjang jalan mantap. Namun pada saat yang sama, ruas lain yang tidak ditangani dapat mengalami degradasi alami (akibat beban lalu lintas, cuaca, drainase/lingkungan, dan faktor operasional), sehingga penambahan kemantapan pada ruas yang ditangani dapat terimbangi oleh penurunan kemantapan pada ruas lain.

Pada jaringan jembatan, perubahan capaian mantap ditentukan oleh perubahan status kondisi jembatan dalam basis data (misalnya dari Sedang menjadi Baik, atau sebaliknya), dengan kriteria perhitungan tertentu. Artinya, meskipun terdapat output fisik pada komponen pendukung (misalnya oprit atau pekerjaan minor), output tersebut tidak selalu mengubah kategori kondisi jembatan pada basis data sehingga tidak otomatis menambah “panjang jembatan mantap” pada indikator outcome.

Dengan demikian, angka capaian indikator program merupakan hasil net effect perubahan kondisi jaringan (peningkatan pada ruas/jembatan yang ditangani dikurangi penurunan pada ruas/jembatan lain), sedangkan output kegiatan merepresentasikan volume pekerjaan pada lokasi tertentu. Oleh karena itu, evaluasi kinerja perlu membaca kedua level tersebut secara komplementer: output kegiatan menunjukkan pelaksanaan fisik, sementara indikator program menunjukkan perubahan layanan jaringan secara keseluruhan pada akhir tahun.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga pada Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan dan menjaga kondisi kemantapan jaringan jalan kabupaten sebagai kontribusi terhadap indikator Persentase Infrastruktur Fisik

dalam Kondisi Baik. Capaian kondisi mantap jalan pada akhir Tahun 2025 dihitung berdasarkan evaluasi kondisi jaringan jalan dan pemutakhiran basis data kondisi jalan, dengan membandingkan kondisi awal (baseline) Tahun 2024 dan kondisi akhir Tahun 2025.

Jumlah total panjang jalan kabupaten adalah 732,46 km. Berdasarkan data baseline Tahun 2024, panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap tercatat sebesar 463,90 km atau 63,33%. Pada akhir Tahun 2025, panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 483,62 km atau 66,03%. Dengan demikian, terjadi penambahan panjang jalan mantap sebesar 19,72 km selama Tahun 2025, atau meningkat 2,70 poin persentase dibanding tahun 2024.

Adapun perbandingan pencapaian kinerja pogram Penyelenggaraan Jalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kondisi Mantap Jalan Kabupaten (2023–2025)

No.	Sasaran Program	Indikator	Sat	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025 (Target)	Tahun 2025 (Realisasi)	Capaian
1	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten yang mantap dan berfungsi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	61,47	63,33	64,57	66,03	102,28

Sumber : E-SAKP 2025

Pada tabel di atas, terlihat tren yang menunjukkan peningkatan bertahap, dari 61,47% (2023) menjadi 63,33% (2024) dan meningkat kembali menjadi 66,03% (2025). Kenaikan dari 2024 ke 2025 sebesar 2,70 poin persentase memperlihatkan bahwa kinerja peningkatan dan pemeliharaan jalan pada ruas-ruas prioritas mampu memperbaiki kondisi layanan jaringan secara agregat.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengaspalan jalan menghasilkan output pekerjaan sepanjang 20.223 meter pada ruas-ruas yang ditangani sesuai dokumen pelaksanaan kegiatan dan telah meningkatkan kualitas struktur jalan pada lokasi penanganan. Namun demikian, indikator kondisi mantap jalan bersifat agregat jaringan, sehingga besaran output pekerjaan fisik per paket tidak selalu berbanding lurus secara langsung dengan penambahan panjang jalan mantap pada akhir tahun. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi jaringan secara keseluruhan, termasuk degradasi pada ruas lain yang tidak ditangani secara langsung akibat beban lalu lintas, cuaca, dan

kondisi lingkungan.

Dengan demikian, capaian kondisi mantap jalan pada Tahun 2025 merupakan hasil agregasi dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, kegiatan pemeliharaan, serta pemutakhiran kondisi jaringan jalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, output fisik tahunan pada ruas tertentu perlu dibaca sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas pada lokasi penanganan, sementara indikator kondisi mantap menggambarkan kondisi layanan jaringan secara keseluruhan pada akhir tahun.

Jaringan Jalan yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sajikan pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Jaringan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : SK Jalan Kabupaten 2023



Rehabilitasi Ruas Jalan Tabihi - Telaga
Langsat Kec. Telaga Langsat



Perkuatan Tebing Ruas Jalan
Taniran Selatan Kubah - Buntut
Wawaran Kec. Angkinang



Rekonstruksi Ruas Jalan Samuda –
Bajayau Kec. Daha Barat (Dana Bagi
Hasil Sawit
Tahap 3)



Kegiatan Rutin Jembatan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Bina Marga tahun 2025

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Faktor keberhasilan Sasaran Program meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.554.050.234

(Delapan Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) didalamnya memuat Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a. **Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.972.546.234. Melalui subkegiatan ini telah dibangun sarana SPALD setempat sebanyak 421 unit yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, meliputi pembangunan SPALD-S di Kecamatan Daha Selatan (50 unit), Daha Barat (48 unit), Daha Utara (56 unit), Angkinang (71 unit), Padang Batung (63 unit), serta Desa Paharuangan Kecamatan Sungai Raya (20 unit). Selain itu, dilaksanakan pembangunan SPALD JAGAT di Desa Bajayau Kecamatan Daha Barat sebanyak 11 unit, serta pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Bersama Berkelanjutan Seribu Sarana Air Minum Sehat dan Sanitasi (Gebrak Sehati) sebanyak 102 unit di wilayah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan.

Gebrak Sehati merupakan inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dirancang untuk mempercepat peningkatan akses air minum sehat dan sanitasi layak melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Inovasi ini mengintegrasikan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi, sehingga mampu memperluas cakupan layanan secara efektif dan tepat sasaran.



Pekerjaan Pembangunan SPALD-S di Kec. Daha Selatan



Pekerjaan Pembangunan SPALD-S di Kec. Angkinang



Pekerjaan Pembangunan SPALD JAGAT di Desa Bajayau Kec. Daha Barat



Program Gerakan Pembangunan Bersama Berkelanjutan Seribu Sarana Air Minum Sehat dan Sanitasi (Gebrak Sehati) di Kab. Hulu Sungai Selatan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

- b. **Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp581.504.000. Melalui subkegiatan ini, pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Individual yang dikelola oleh UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dilaksanakan untuk menjaga

keberfungsian sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik agar tetap beroperasi sesuai dengan standar teknis dan ketentuan kesehatan lingkungan. Kegiatan difokuskan pada satu jenis pekerjaan, yaitu operasional dan pemeliharaan IPLT, yang meliputi pengoperasian instalasi, pemeliharaan rutin peralatan dan bangunan pendukung, serta pengelolaan lumpur tinja hasil pelayanan sedot tinja sesuai dengan prosedur operasional standar.



Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Individual (UPTD IPLT)

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Faktor keberhasilan Sasaran Program Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik dengan indikator Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.804.462.339 (Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) di dalamnya memuat Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a. **Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran** sebesar Rp82.399.674.699



Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah SD Negeri 1 Samuda



Pekerjaan Pembangunan Kantor Kecamatan Angkinang (Lanjutan)



Pekerjaan Rehabilitasi Polsek Sungai Raya



Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kejari (Lanjutan)



Pekerjaan Peningkatan Struktur Mesjid Nurul Hidayah



Pekerjaan Pembangunan Mini Soccer Kec. Sungai Raya

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

- b. **Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, serta pendataan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dilaksanakan dengan dukungan anggaran**

sebesar Rp404.787.640. Subkegiatan ini menargetkan penerbitan dokumen PBG dan SLF sebanyak 100 dokumen pada Tahun 2025. Sampai dengan akhir tahun, realisasi penerbitan dokumen mencapai 113 dokumen yang terdiri atas 97 dokumen PBG dan 16 dokumen SLF, atau sebesar 113% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang efektif dalam penyelenggaraan layanan perizinan bangunan gedung serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan.

Dari aspek penerimaan daerah, ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 341.050.754,00, dengan realisasi sampai akhir Tahun 2025 sebesar Rp 797.001.763,00 atau mencapai sekitar 233,69% dari target. Realisasi tersebut mencerminkan optimalisasi kinerja pelayanan perizinan melalui SIMBG serta kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.



Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bersama Tim Profesi Ahli (TPA)

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Faktor keberhasilan pencapaian Sasaran Program Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar dengan indikator Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.736.658.770 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang di dalamnya memuat dua subkegiatan utama, yaitu:

- a. **Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan** dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.078.866.770, yang menghasilkan pembangunan saluran drainase sepanjang 337,4 meter. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi jaringan drainase dalam mengurangi potensi genangan serta mendukung kelancaran aliran air di kawasan perkotaan.
- b. **Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.657.792.000, telah dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase sepanjang 3.466 meter. Selain itu, dilakukan rehabilitasi trotoar sepanjang 50 meter serta pemeliharaan trotoar sepanjang 1.773 meter. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberfungsian infrastruktur drainase dan trotoar agar tetap dalam kondisi baik, aman, dan nyaman digunakan oleh masyarakat.



Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Trotoar dan Pedestrian Kel. Kandangan Kota



Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Brigjend H. Hasan Basry



Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pangeran Antasari



Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jalan Pemuda dan Sistem 6

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi dengan Indikator Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Keahlian dengan target 50,80% dan realisasi 48,83% belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena peserta pelatihan tidak menghadiri pelatihan tersebut.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.092.050,641 (dua miliar sembilan puluh dua juta lima puluh ribu enam ratus empat satu rupiah). Program ini memuat 3 kegiatan yaitu:

- a. **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** dengan anggaran sebesar Rp1.553.874.834 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Di dalam nya terdapat 3 sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mana didalamnya mengakomodir jumlah pengawasan paket pekerjaan. Pada kegiatan ini realisasi anggarannya adalah Rp832.952.530.
- b. **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp134.470.730 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Didalam nya terdapat 3 sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI, Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan realisasi anggaran sebesar Rp62.361.205 (enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** dengan anggaran sebesar Rp403.705.077 (empat ratus tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Didlamnya terdapat 5 subkegiatan antara lain : Penyediaan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis, Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, Penyediaan Instuktur/Asesor/Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis

atau Analis, Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, Pelatihan Tenaga Kerja Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis dengan realisasi anggaran sebesar Rp225.561.466 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).



Pembukaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi



Pemberian Materi Pelatihan Kerja Konstruksi



Praktek & Uji Sertifikasi Pelatihan Kerja Konstruksi



Sertifikat Kompetensi Peserta Pelatihan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi tahun 2025

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun tingkat efisiensi anggaran dalam mencapai target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (e)	Capaian Anggaran	Efisiensi	Ket
			(a)	(b)	$c=(b/a) \times 100$	(d)		$(f)=(e/d) \times 100$	$(g)=c/f$	
1	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap	61.38 %	61.59%	100.34%	Rp 127.515.894.485.	Rp 89.216.409.877	69.96%	1,43	Efisien
2	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	80.57 %	80.57%	100%	Rp. 18.554.050.234	Rp.12.300.816.653	66.34%	1.51	Efisien
3	Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	100%	100%	100%	Rp. 82.804.462.339	Rp. 57.550.576.238	69.49%	1.44	Efisien
4	Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar	Persentase prasarana dalam kondisi baik	75.13 %	76.27%	101.52%	Rp. 3.736.658.770	Rp. 3.651.137.660	97.71%	1.04	Efisien
5	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai standar keahlian dan sertifikasi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian	50.80 %	48.83%	96.12%	Rp 2.092.050.641	Rp 1.120.875.201	53.58%	1,79	Efisien
Rata - rata efisiensi									1.44	Efisien

Efisiensi adalah nilai yang menunjukkan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Semakin besar nilai efisiensi maka semakin baik, Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efisien dalam mencapai

target sasaran strategis dengan nilai rata-rata 1,44. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya dalam hal ini anggaran sangat efektif dan efisien.

SASARAN STRATEGIS II
Meningkatnya Akses dan Keterlayanan Masyarakat terhadap Sistem Distribusi Air Bersih

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih adalah **Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis atas Realisasi dengan Target Kinerja

Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih menggambarkan tingkat keterjangkauan dan keterlayanan sistem distribusi air bersih kepada rumah tangga di wilayah perdesaan. Cakupan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sistem penyediaan air minum yang meliputi sumber air baku, prasarana dan sarana pengolahan, serta jaringan distribusi yang berfungsi menyalurkan air minum layak kepada masyarakat secara berkelanjutan sesuai standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Capaian Kinerja Indikator Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	%	83.65	83.65	100

Sumber : E-SAKP 2025

Pencapaian indikator persentase ketersediaan air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum

layak dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam data rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Se Kab. HSS}} \times 100\%$$

$$\frac{52.673}{62.971} \times 100\%$$

$$= 83,65 \%$$

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih disajikan melalui data target dan realisasi pelayanan air minum per kecamatan, yang meliputi rumah tangga terlayani jaringan perpipaan, terlayani bukan jaringan perpipaan, serta rumah tangga yang belum terlayani, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari Tahun 2025

No	Kecamatan	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)
1	Angkinang	5915	4407	792	716
2	Daha Barat	1749	1160	152	437
3	Daha Selatan	9808	7164	993	1651
4	Daha Utara	7105	4158	1377	1570
5	Kalumpang	1981	1057	743	181
6	Kandangan	13659	7774	4438	1447
7	Loksado	2687	1162	1111	414
8	Padang Batung	6565	2747	1937	1881
9	Simpur	4803	3066	1049	688

No	Kecamatan	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)
10	Sungai Raya	5621	3338	1398	885
11	Telaga Langsung	3078	1971	679	428
TOTAL		62.971	38.004	14.669	10.298
Persentase Layanan			60.35%	23.29%	16.35%
Capaian SPM			83.65%		

Keterangan

Sumber : Sumber Data Dinas PUPR bidang Cipta Karya berdasarkan Hasil Perhitungan Capaian SPM Air Minum Tahun 2025

JP adalah Jaringan Perpipaan

BJP adalah Jaringan Bukan Perpipaan

Berdasarkan Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum pada pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari Tahun 2025, jumlah total target rumah tangga yang harus dilayani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak 62.971 unit rumah. Target tersebut merupakan keseluruhan rumah tangga yang menjadi sasaran pelayanan air minum layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari total target tersebut, realisasi pelayanan air minum terdiri dari dua jenis layanan, yaitu Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Realisasi pelayanan melalui Jaringan Perpipaan (JP) tercatat sebanyak 38.004 unit rumah, sedangkan realisasi pelayanan melalui Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebanyak 14.669 unit rumah. Dengan demikian, total rumah tangga yang telah memperoleh akses layanan air minum, baik melalui JP maupun BJP, adalah sebanyak 52.673 unit rumah.

Adapun sebaran capaian perwilayah kecamatan lebih jelas dapat dilihat pada peta wilayah dibawah ini.

PETA SEBARAN AIR MINUM

(White)	71% - 79%
(Light Pink)	78% - 84%
(Pink)	84% - 86%
(Dark Red)	86% - 88%
(Red)	88% - 91%

Goggle sat

Berdasarkan peta sebaran akses air minum dan tabel persentase keterlayanan air minum per kecamatan, terlihat bahwa perbedaan gradasi warna pada peta menunjukkan variasi tingkat keterlayanan air minum masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wilayah dengan warna merah lebih tua mencerminkan persentase rumah tangga terlayani yang lebih tinggi, sedangkan wilayah dengan warna lebih muda menunjukkan persentase keterlayanan yang lebih rendah.

Kecamatan	Persentase terlayani	Persentase belum terlayani
Angkinang	87,90	12,10
Daha Barat	75,01	24,99
Daha Selatan	83,17	16,83
Daha Utara	77,90	22,10
Kalumpang	90,86	9,14
Kandangan	89,41	10,59
Loksado	84,59	15,41
Padang Batung	71,35	28,65
Simpur	85,68	14,32
Sungai Raya	84,26	15,74
Telaga Langkat	86,09	13,91

38

Berdasarkan grafik di atas, Kecamatan Kalumpang memiliki tingkat keterlayanan air minum tertinggi, dengan persentase rumah tangga terlayani sebesar 90,86%, sementara persentase rumah tangga belum terlayani hanya 9,14%. Kondisi ini diikuti oleh Kecamatan Kandangan dengan tingkat keterlayanan 89,41% dan Kecamatan Angkinang sebesar 87,90%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut telah memperoleh akses air minum.

Secara umum, grafik tersebut menggambarkan bahwa capaian akses air minum antar kecamatan masih bervariasi, sehingga ke depan diperlukan prioritas program peningkatan layanan air minum pada kecamatan dengan persentase belum terlayani yang masih tinggi, khususnya Padang Batung, Daha Barat, dan Daha Utara, guna mendorong pemerataan akses air minum layak di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Analisis atas Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

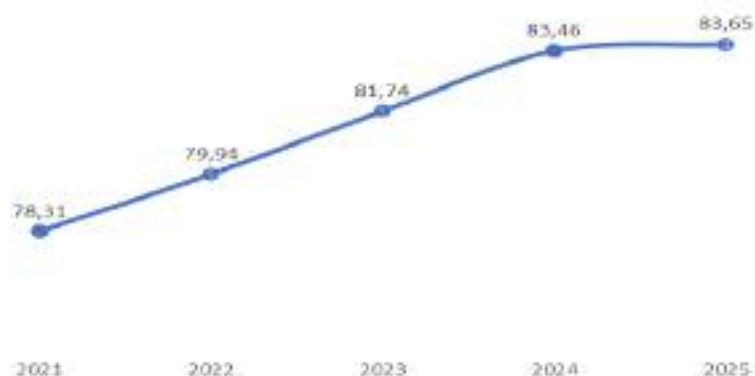
Berikut di sajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun dalam tabel dan grafik.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih dari Tahun ke Tahun

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	%	78.31	79.94	81.74	83.46	83.65

Sumber : Dinas PUPR bidang Cipta Karya berdasarkan Hasil Perhitungan Capaian SPM Air Minum Tahun 2025

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahun



Sumber : Dinas PUPR bidang Cipta Karya berdasarkan Hasil Perhitungan Capaian SPM Air Minum Tahun 2025

Secara tren, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Tahun 2021 sebesar 78.31%, meningkat menjadi 79.94% pada Tahun 2022, 81.74% pada Tahun 2023, dan 83.46% pada Tahun 2024, hingga mencapai 83.65% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya progres positif dalam perluasan akses layanan air bersih di kawasan perdesaan.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	%	83.65	84.12	84.60	85.08	85.55

Sumber : E-SAKP 2025

Realisasi cakupan masyarakat di kawasan perdesaan yang terlayani air bersih Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2025 tercatat sebesar 83.65%, sementara target jangka menengah RPJMD Tahun 2029 ditetapkan sebesar 85.55%. Dengan demikian, masih terdapat deviasi sebesar 1.90 poin persentase yang perlu dikejar untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan sisa periode perencanaan hingga tahun 2029, diperlukan penguatan program dan percepatan intervensi, khususnya melalui pembangunan dan optimalisasi sistem distribusi air bersih, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta perluasan jaringan layanan ke wilayah yang belum terjangkau, agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

d. Analisis Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja dengan Pemerintah Daerah lain dan Standar Nasional belum dapat dilakukan karena perbedaan indikator yang di pakai.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Capaian indikator Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih pada tahun 2025 mencapai 83,65 persen, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 83,65 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, baik yang berasal dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal.

Faktor Internal Organisasi

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan pendekatan teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perdesaan, termasuk pemilihan lokasi dan kapasitas SPAM yang tepat sasaran, sehingga pelayanan air bersih dapat menjangkau masyarakat prioritas secara efektif
- Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan dan kompetensi SDM teknis yang melaksanakan program dan kegiatan SPAM perdesaan mendukung pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis, sehingga target kinerja dapat tercapai.
- Anggaran yang tersedia
Dukungan alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan anggaran yang efektif memungkinkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPAM perdesaan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.
- Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung SPAM, termasuk jaringan perpipaan dan bangunan penunjang, telah mendukung optimalisasi cakupan layanan air bersih di wilayah perdesaan yang menjadi sasaran program.

- **Koordinasi dan Kolaborasi (Crosscutting)**

Terjalinnya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas PUPR dengan pemerintah desa, kecamatan, serta perangkat daerah terkait mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan SPAM, khususnya dalam penentuan lokasi dan penerima manfaat.

- **Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kepemimpinan**

Penerapan SOP yang jelas serta dukungan kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan yang tepat, dan penyelesaian kendala di lapangan, sehingga target kinerja dapat di capai sesuai rencana.

Faktor Eksternal

- **Kebijakan dan Regulasi**

Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah terkait penyediaan layanan dasar air bersih memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan program SPAM perdesaan.

- **Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat**

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan yang relatif mendukung memungkinkan penerimaan dan pemanfaatan layanan air bersih secara optimal.

- **Partisipasi Masyarakat**

Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan menerima sambungan rumah dan menjaga sarana air bersih, berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto-Foto Hasil Kegiatan

Faktor keberhasilan pencapaian Sasaran Program Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih melalui jaringan perpipaan dan nonperpipaan dengan Jumlah debit air yang didistribusikan pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.408.245.500

(Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang di dalamnya memuat dua subkegiatan utama, yaitu:

- a. Subkegiatan **Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** Jaringan Perpipaan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.174.789.500. Pada subkegiatan ini telah dilaksanakan pembangunan dan perluasan SPAM di beberapa desa dan kecamatan yang meliputi penambahan Sambungan Rumah (SR). Pelaksanaan pekerjaan tersebut menghasilkan total 117 Sambungan Rumah (SR) yang terbangun/terpasang, sehingga turut meningkatkan cakupan layanan air bersih dan mendukung peningkatan jumlah debit air yang didistribusikan kepada masyarakat.
- b. Subkegiatan **Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.456.000.



Pekerjaan Perluasan SPAM Desa Hamayung Kec. Daha Utara



Pekerjaan Pembangunan SPAM Desa Balah Paikat Kec. Daha Utara

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

Selain penambahan sambungan rumah, dilaksanakan pula kegiatan

perluasan jaringan perpipaan pada beberapa lokasi sebagai penguatan sistem SPAM eksisting. Meskipun pada tahun berjalan belum seluruh kegiatan tersebut berdampak langsung pada penambahan SR, kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk peningkatan cakupan layanan pada tahun-tahun berikutnya.

Kontribusi kegiatan ini bersifat tidak langsung, namun strategis dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan sistem air minum perdesaan.



Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan (Lanjutan)



Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Hariti Kec. Sungai Raya

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

Bimbingan Teknis Kelembagaan Pengelolaan SPAM dalam Rangka Memperkuat Kapasitas Manajemen HIPPAM

Sebagai upaya nonfisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis Sosialisasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) bagi Kelompok Pengelola HIPPAM yang diikuti oleh 44 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025.

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola SPAM dalam melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan, sehingga sarana air minum yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi yang kuat dalam menjaga keberlanjutan layanan dan mencegah penurunan cakupan akibat kerusakan atau kurangnya pemeliharaan.



Bimbingan Teknis Sosialisasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2025

Analisis Kontribusi Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang kuat dalam mendukung pencapaian indikator kinerja. Kegiatan fisik SPAM berperan langsung dalam peningkatan cakupan layanan air bersih, sedangkan kegiatan nonfisik berupa Bimtek HIPPAM berperan dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang kontribusinya bersifat jangka menengah, seperti perluasan jaringan perpipaan tanpa penambahan SR pada tahun berjalan. Untuk itu, pada tahun berikutnya diperlukan penyesuaian strategi dengan mengintegrasikan perluasan jaringan tersebut dengan penambahan sambungan rumah agar dampaknya terhadap indikator kinerja dapat lebih optimal.

Tindak Lanjut dan Penyesuaian Strategi ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan berupaya untuk terus mengoptimalkan perluasan jaringan perpipaan dengan penambahan sambungan rumah pada wilayah yang telah siap secara teknis, serta melanjutkan dan memperluas pelaksanaan Bimtek HIPPAM untuk meningkatkan kapasitas pengelola SPAM di desa-desa lainnya.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan hasil yang efisien. Berikut ditampilkan hasil perhitungannya :

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja (a)	Realisasi Kinerja (b)	Capaian Kinerja $c=(b/a) \times 100$	Pagu Anggaran (d)	Realisasi Anggaran (e)	Capaian Anggaran (f) = $e/d \times 100$	Efisien (g) = c/f	Ket
1	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	83,65%	83,65%	100%	Rp. 7.408.245.500	Rp. 4.457.535.115	60,01%	1,67	Efisiensi

Sumber : Bidang Cipta Karya

SASARAN STRATEGIS III
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang Ditetapkan

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan adalah **Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis atas Realisasi dengan Target Kinerja

Realisasi Indikator sebesar 83,06% telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 79,17% dengan tingkat capaian mencapai sekitar 104,91%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang berjalan lebih efektif dari yang direncanakan. Keberhasilan pencapaian Indikator ini mencerminkan bahwa pelaksanaan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

Capaian indikator Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Capaian Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	%	79.17	83.06	104.91

Sumber : E-SAKP

Adapun formulasi perhitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW

Permohonan Masuk = 360 dokumen

Berkas dikembalikan = 61 dokumen

KRK yang diterbitkan = 202 dokumen

Rekomendasi PKKPR yg diterbitkan = 97 dokumen

$$\text{Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi tata ruang yg diterbitkan (KRK + Rekomendasi PKKPR)}}{\text{Jumlah permohonan tata ruang}} \times 100$$

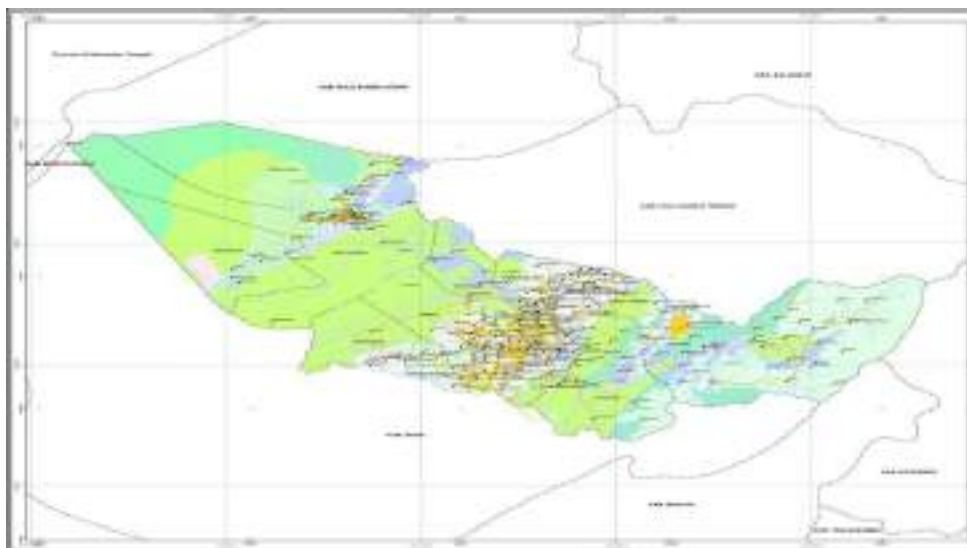
$$\text{Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW} = \frac{202 + 97}{360} \times 100$$

$$\text{Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW} = \frac{299}{360} \times 100$$

$$\text{Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW} = 83.06 \%$$

Perencanaan Tata Ruang digambarkan dalam sebuah Peta Rencana Pola Ruang, yakni dokumen perencanaan tata ruang yang memperlihatkan pembagian dan peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peta ini menjadi pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan perizinan, serta penyusunan rencana sektoral dan investasi daerah.

Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : Lampiran dokumen Perda RTRW Kab.HSS nomor 3 tahun 2014

b. Analisis atas Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Tata Ruang yang sesuai RTRW jika dilihat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Persentase Tata Ruang Sesuai RTRW Setiap Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sat	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	%	69,32	72,95	79,17	83,06	104,9

Sumber : Data Dinas PUPR Bid. Penataan Ruang & Jasa Konstruksi berdasarkan Capaian RTRW

Realisasi indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW pada tahun pelaporan mencapai 83,06%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 69,32% dan 72,95%, atau meningkat sebesar 13,74% dibandingkan dengan Tahun 2023

Diagram 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dari Tahun ke Tahun



Sumber : Data Dinas PUPR Bid. Penataan Ruang & Jasa Konstruksi berdasarkan Capaian RTRW

Peningkatan capaian kinerja tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelaksanaan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini didukung oleh semakin optimalnya proses pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan terarah.

Selain itu, peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya juga mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya sosialisasi kebijakan penataan ruang serta penerapan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang telah memberikan dampak positif terhadap konsistensi pemanfaatan ruang.

Dengan tren peningkatan kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam mendukung tertib pemanfaatan ruang sesuai RTRW menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, upaya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang perlu terus diperkuat agar peningkatan kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Realisasi cakupan Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2025 tercatat sebesar 79,17%, sementara target jangka menengah RPJMD Tahun

2029 ditetapkan sebesar 87.08%. Dengan demikian, masih terdapat deviasi sebesar 7.91 poin persentase yang perlu dikejar untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan sisa periode perencanaan hingga tahun 2029, diperlukan penguatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang, agar konsistensi pemanfaatan ruang sesuai RTRW tetap terpelihara sehingga target RPJMD dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Perbandingan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Target Kinerja Jangka Menengah Persentase Tata Ruang yang sesuai dengan RTRW

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	%	79,17	81,25	83,75	85	87,08

Sumber : Data Dinas PUPR Bid. Penataan Ruang & Jasa Konstruksi berdasarkan Capaian RTRW

d. Analisis Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional

Realisasi indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW pada tahun pelaporan mencapai 83,06%. Capaian tersebut berada pada tingkat yang relatif baik apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pemerintah daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan tantangan penataan ruang yang sejenis.

Secara umum, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa dinamika pembangunan, keterbatasan pengendalian, serta tingginya tekanan pemanfaatan ruang. Dalam konteks tersebut, capaian sebesar 83,06% menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu mengelola dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara lebih efektif dibandingkan rata-rata praktik yang umum terjadi.

Indikator kinerja yang digunakan tingkat nasional yaitu tersusunnya Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) sedangkan untuk Kabupaten adalah turunan dari RTRW Provinsi Kalimantan Selatan berupa RTRW dan RDTR. Sehingga pengukuran indikator kinerjanya berbeda dan tidak bisa

diperbandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Realisasi indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW pada tahun pelaporan mencapai 83,06%, menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya serta melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

a. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang telah dilakukan secara lebih selektif dan konsisten mengacu pada RTRW.

b. Peningkatan koordinasi lintas sektor

Koordinasi antar perangkat daerah terkait penataan ruang berjalan lebih efektif, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih selaras dengan ketentuan RTRW.

c. Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.

d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pemangku kepentingan

Upaya sosialisasi kebijakan penataan ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan RTRW.

Keberhasilan peningkatan kinerja pada indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW juga tidak terlepas dari dukungan faktor internal dan eksternal organisasi, antara lain:

Faktor Internal Organisasi

1. Kejelasan tugas dan fungsi organisasi

Pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan dengan jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkoordinasi.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebijakan dan regulasi penataan ruang, sehingga mampu melaksanakan tugas pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif.

3. Komitmen pimpinan dan jajaran organisasi

Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang sesuai RTRW mendorong konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

4. Ketersediaan pedoman dan regulasi internal

Tersedianya pedoman, standar operasional prosedur, serta regulasi internal yang mendukung pelaksanaan penataan ruang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Koordinasi internal yang efektif

Koordinasi antar unit kerja dalam organisasi berjalan dengan baik, sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan monitoring pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara terpadu.

6. Pemanfaatan data dan informasi penataan ruang

Penggunaan data dan informasi penataan ruang sebagai dasar pengambilan keputusan mendukung ketepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor internal tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian kinerja penataan ruang. Ke depan, penguatan kapasitas organisasi dan peningkatan kualitas SDM akan terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Faktor Eksternal Organisasi

1. Dinamika pertumbuhan dan aktivitas pembangunan

Meningkatnya kebutuhan pembangunan dan investasi memberikan tekanan terhadap pemanfaatan ruang, namun sekaligus mendorong perlunya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih tertib dan sesuai RTRW.

2. Tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap ketentuan penataan ruang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

3. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi

Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penataan ruang, termasuk penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, turut memperkuat implemetasi RTRW di daerah.

4. Koodinasi dengan instansi eksternal terkait,
Kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah daerah lainnya, serta pemangku kepentingan terkait berperan penting dalam menjaga konsistensi pemanfaatan ruang lintas wilayah dan sektor.
5. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memengaruhi pola pemanfaatan ruang. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang terkendali mendukung kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
6. Perkembangan teknologi dan sistem informasi
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi penataan ruang secara nasional memberikan dukungan dalam peningkatan akurasi data dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor – faktor eksternal tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap capaian kinerja penataan ruang. Oleh karena itu, sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

2. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang, alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang secara transparan dan akuntabel.
- b. Penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan ruang.
- d. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait ketentuan RTRW

Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan kinerja penataan ruang dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan. Ke depan, upaya pengendalian, pengawasan, serta penegakan ketentuan penataan ruang akan terus diperkuat guna menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sesuai RTRW.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto-Foto Hasil Kegiatan

Faktor Keberhasilan sasaran strategis terpenuhinya penyelenggaraan Penataan ruang dengan Indikator Persentase Tata Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW Tahun 2025 didukung dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diampu oleh Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yaitu dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk pemenuhan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penguatan pengendalian pemanfaatan Ruang. Kegiatan Untuk pemenuhan Dokumen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp2.334.595.182,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), didalamnya memuat:
 - 1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota, subkegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota, serta subkegiatan Penetapan RTRW kabupaten/Kota dengan alokasi Anggaran sebesar Rp386.365.182 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah), di dalamnya mengakomodir Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW, Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota dan Pendampingan Penetapan Ranperda Revisi RTRW Kab. HSS serta Raperkada RDTR. Pada Kegiatan ini realisasi anggarannya Rp284.566.936 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan persentase capaian 52,69 %.



Konsultasi dan Asistensi Revisi RTRW dan Penyusunan RDTR



Asistensi Progres Pemenuhan Dokumen Persetujuan Substansi dan Persiapan Rencana Pembahasan Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Kandangan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi tahun 2025

- 1.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sebesar Rp1.948.230.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), di dalamnya mengakomodir Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Honorarium Pejabat Pmbuat Komitmen (PPK) dengan alokasi dana sebesar Rp18.860.000 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), Pelaksanaan Penyusunan RDTR Perkotaan Loksado, RDTR Perkotaan Daha Selatan dan RDTR Perkotaan Sungai Raya dengan alokasi dana sebesar Rp319.190.000 (tiga ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Pada Kegiatan ini Realisasi Anggaran sebesar Rp1.105.831,329 (satu miliar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan persentase capaian 67,88%



Penyusunan RDTR Perkotaan Sungai Raya



Penyusunan RDTR Perkotaan Daha Selatan



Penyusunan RDTR Perkotaan Loksado

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi tahun 2025

- 1.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran Rp319.190.000 (tiga ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), di dalamnya mengakomodir Honorarium Narasumber Kabupaten dan Provinsi Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) dan makan minum rapat FPR, serta pembayaran Jasa Tenaga Administrasi. Pada Kegiatan ini Realisasi anggarannya sebesar Rp54.251.516 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan persentase capaian 17%.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan Indikator “Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW” dapat dijabarkan dalam tabel Berikut :

Tabel 3.17 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025

Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dan Satuan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	
	Indikator	Sat	Output/ Outcome	Pagu Anggaran (Rp)	Output/ Outcome	Pagu Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kecamatan Yang Memiliki RDTR	%	9	2.334.595.182	0	1.444.649.781
Penetapan Rencna Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL), Persntase Tata Ruang Yang Sesuai Dengan RTRW,	Kawa san	1	386.365.182	0	284.566.936
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dok	1	252.156.182	0	174.566.936
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen Persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	Dok	1	10.406.000	0	-
Penetapan Rencna Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dok	1	123.803.000	1	110.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	Kegia tan	12	319.190.000	12	54.251.516
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruag	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dok	12	319.190.000	12	54.251.516
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang direvisi atau disesuaikan	Dok	1	1.629.040.000	1	1.105.831.329
Pernyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pernyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dok	1	1.629.040.000	1	1.105.831.329

Sumber : Data Dinas PUPR Bid. Penataan Ruang & Jasa Konstruksi berdasarkan Capaian RTRW

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana.

Capaian kinerja sebesar 83,06%, yang melampaui target kinerja sebesar 79,17%, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan efisien. Capaian kinerja yang lebih tinggi dari target tersebut dapat diraih tanpa adanya peningkatan sumber daya yang signifikan dibandingkan dengan dengan perencanaan awal.

Dari aspek anggaran, pelaksanaan kegiatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara selektif dan terarah, sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap secara optimal untuk peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

Dari aspek sumber daya manusia, pemanfaatan kompetensi aparatur dilakukan secara optimal melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien tanpa penambahan personel yg signifikan.

Dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan data, informasi, serta sistem pendukung penataan ruang yang telah tersedia turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan, terutama dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan secara efisien dan berkontribusi positif terhadap peningkatan capaian kinerja. Ke depan, optimalisasi penggunaan sumber daya akan terus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan antara capaian kinerja dan ketersediaan sumber daya yang ada.

Berikut ditampilkan tabel perhitungan efisiensi untuk Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW

N o	Sasaran	Indikator	Targ et Kine rja (a)	Real isasi Kinerj a (b)	Capai an Kinerj a © = (b/a)x 100	Pagu Anggaran (d)	Realisasi Anggaran (e)	Capaia n Anggar an (f)=e/d x100	Efisie nsi (g)=c /f	Ket
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Persentase tata ruang yang sesuai dengan RTRW	79,17%	83,06%	104,90%	Rp2.334.595.182	Rp1.444.649.781	61,88	1,69	Efisien

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW telah dilaksanakan secara efisien. Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi anggaran antara lain:

1. Perencanaan yang tepat sasaran
Anggaran dialokasikan hanya pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, sehingga tidak terjadi pemborosan pada kegiatan yang kurang relevan.
2. Penggunaan sumber daya internal secara optimal
Kapasitas dan kompetensi SDM internal dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sebagian kegiatan dapat dilaksanakan tanpa perlu penambahan personel atau biaya eksternal tambahan.
3. Pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi yang ada
Penggunaan sistem informasi penataan ruang, data digital, dan fasilitas monitoring yang sudah tersedia mengurangi kebutuhan pengeluaran tambahan, sekaligus mempercepat proses evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Koordinasi yang efektif antar unit kerja

Efisiensi juga tercapai karena adanya koordinasi yang baik antarunit kerja, sehingga kegiatan dapat dilakukan secara sinergis tanpa duplikasi atau tumpang tindih anggaran.

5. Prioritas pada kegiatan strategis

Fokus anggaran diberikan pada kegiatan prioritas yang memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian indikator, seperti pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan rekomendasi kesesuaian, dan monitoring pelaksanaan RTRW.

Dengan langkah-langkah tersebut, anggaran digunakan secara produktif dan proporsional, menghasilkan capaian kinerja yang tinggi sekaligus menjaga efisiensi penggunaan sumber daya. Ke depan, strategi perencanaan berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi anggaran secara berkelanjutan.

SASARAN STRATEGIS IV
Meningkatnya Ketersediaan dan Keberlanjutan Layanan Air Irigasi Bagi Lahan Produktif

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif adalah **Persentase Air Irigasi Tersedia** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis atas Realisasi dengan Target Kinerja

Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan sangat dipengaruhi oleh kondisi serta kinerja jaringan irigasi. Jaringan irigasi meliputi saluran irigasi, bangunan utama seperti bendung dan bangunan bagi, serta bangunan pelengkap lainnya yang secara terpadu berfungsi sebagai satu kesatuan sistem. Sistem tersebut berperan dalam menjamin proses penyediaan, pembagian, pengaturan, pemanfaatan, hingga pembuangan air irigasi agar dapat dialirkan secara merata, adil, dan berkelanjutan ke seluruh lahan pertanian. Keandalan setiap komponen jaringan irigasi menjadi faktor penentu dalam menjaga kontinuitas layanan air, khususnya pada periode musim tanam dengan kebutuhan air yang tinggi.

Tabel 3.19 Formulasi Persentase Air Irigasi Tersedia

No	Sasaran	Indikator	Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	persentase air irigasi tersedia	$\frac{\text{ketersediaan debit air}}{\text{kebutuhan air irigasi}} \times 100\%$

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Pengukuran indikator persentase air irigasi tersedia dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan debit air yang bersumber dari bendung dengan kebutuhan air irigasi yang ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG). RTTG disusun dengan mempertimbangkan pola tanam, jenis tanaman, luas areal persawahan, serta kebutuhan air tanaman pada setiap musim tanam. Dengan pendekatan tersebut, indikator ini tidak hanya menggambarkan kondisi teknis ketersediaan air, tetapi juga mencerminkan tingkat kesesuaian antara pengelolaan sumber daya air dengan perencanaan pertanian daerah. Formulasi indikator ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam menilai efektivitas pengelolaan air irigasi dalam memenuhi kebutuhan riil petani.

Tabel 3.20 Data Ketersediaan dan Kebutuhan Air Irigasi

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	Kebutuhan Air (Lt/det)	Ketersediaan Air (Lt/det)
1	Daerah Irigasi Permukaan	12.726,79	16.544,83	12.740
2	Daerah Irigasi Rawa	3.740,00	4.862,00	2.308
		16.466,79	21.406,83	15.047,50

$$\frac{\text{Ketersediaan debit air}}{\text{Kebutuhan air Irigasi}} \times 100\%$$

$$\frac{15.047,50}{21.406,83} \times 100\% = 70,29\%$$

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Pada Tahun 2025, target persentase ketersediaan air irigasi ditetapkan sebesar 69,90%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi persentase air irigasi tersedia mencapai 70,29%, yakni 15.047,5 liter/detik dari 21.406,83 liter/detik. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,56% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan distribusi air irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target kinerja yang direncanakan. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengaturan distribusi air yang terjadwal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberfungsian saluran irigasi. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Keberlanjutan Layanan Air Irigasi Bagi Lahan Pertanian Produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	69,90%	70,29%	100,56%	72,11%

Sumber : E-SAKP 2025

Adapun sebaran jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tampak pada gambar peta berikut :

Gambar 3.4 Sebaran Jaringan Irigasi HSS



Sumber : Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. HSS

b. Analisis atas Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan indikator penilaian yang digunakan dalam pengukuran kinerja.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Persentase Air Irigasi Tersedia	%	70,29	70,41	70,98	71,53	72,11

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Berdasarkan tabel di atas tercatat target pada akhir tahun perencanaan RPJMD adalah 72,11%, sementara realisasi indikator Persentase Air Irigasi Tersedia tahun 2025 tercatat sebesar 70,29%. Masih terdapat deviasi sebesar 1,82 poin yang harus di upayakan pencapaiannya agar memenuhi target yang diharapkan.

d. Analisis Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja dengan pemerintah daerah lain dan standar nasional belum dapat dilakukan karena perbedaan indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Indikator Persentase Air Irigasi Tersedia Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 69,90%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai 70,29%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100,56%.

Dengan demikian, indikator ini dinilai berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan irigasi telah berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif, khususnya dalam memastikan ketersediaan debit air dari sumber (bendung) hingga ke tingkat lahan pertanian melalui jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dipengaruhi oleh :

Faktor Internal

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal organisasi, antara lain :

1. Inovasi Teknis dan Operasional

Penerapan pendekatan neraca air dalam pengelolaan irigasi memungkinkan penyesuaian yang lebih akurat antara ketersediaan air dan kebutuhan air tanaman. Selain itu, pengaturan pintu-pintu air secara terjadwal terbukti mampu menekan kehilangan air (water losses) selama proses pengaliran.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM pelaksana kegiatan memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemampuan SDM dalam melakukan penyesuaian operasional di lapangan berkontribusi langsung terhadap terjaganya kontinuitas layanan air irigasi.

3. Ketersediaan Anggaran dan Saranaa Prasarana

Dukungan anggaran pemeliharaan rutin serta kondisi jaringan irigasi yang relatif berfungsi baik memungkinkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan berjalan optimal, sehingga mendukung tercapainya target kinerja.

4. Koordinasi dan Tata Kelola

Koordinasi yang efektif melalui forum Komisi Irigasi dalam penyusunan Rencana Tata Tanam memastikan kesesuaian antara pola tanam dan ketersediaan air aktual. Hal ini mengurangi potensi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan air.

5. Penerapan SOP dan Kepemimpinan

Implementasi standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, didukung kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika lapangan, mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu dalam pengelolaan irigasi.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, keberhasilan capaian kinerja juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain:

1. Kondisi Hidrologi dan Cuaca

Ketersediaan debit air dari sumber irigasi yang relatif stabil sepanjang tahun mendukung kelancaran distribusi air sesuai rencana.

2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi memberikan landasan yang mendukung keberlanjutan layanan irigasi dan peningkatan efisiensi pengelolaan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif petani dalam menjaga jaringan irigasi tersier serta kepatuhan terhadap jadwal pembagian air turut berkontribusi signifikan terhadap efektivitas sistem irigasi secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan persentase pencapaian di atas 70%, maka langkah strategis berikut perlu diambil:

1. Jangka Pendek (Operasional)

- **Pengadaan Alat Ukur:** Melakukan pengadaan alat ukur debit di bangunan bagi/sadap untuk memastikan data air tersedia yang dilaporkan benar-benar akurat.
- **Penguatan Komunikasi:** Mengoptimalkan forum koordinasi (Komisi Irigasi) untuk penyusunan Rencana Tata Tanam Global yang lebih presisi sesuai ketersediaan air nyata.

2. Jangka Menengah (Struktural & Digital)

- **Rehabilitasi Jaringan Rusak:** Memprioritaskan perbaikan permanen pada titik kebocoran tinggi (linning saluran) untuk menekan angka kehilangan air.
- **Implementasi Monitoring Berbasis GIS:** Memperbarui data spasial jaringan (file .shp/.shx) dengan atribut kondisi fisik terbaru untuk mempermudah deteksi dini titik lemah distribusi air.
- **Digitalisasi Pintu Air:** Mulai menerapkan sistem pemantauan debit digital (telemetry) di bangunan utama untuk mendapatkan data ketersediaan air secara real-time.

3. Jangka Panjang (Konservasi)

Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA): Melakukan koordinasi lintas

sektor untuk penghijauan di area hulu agar debit air sungai (sumber irigasi) tetap stabil sepanjang musim, termasuk di musim kemarau.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto-Foto Hasil Kegiatan

1. Meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien

Indikator meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien belum ditetapkan target kinerja secara spesifik dalam dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh fokus prioritas program yang pada tahun berjalan lebih diarahkan pada kegiatan fisik dan rehabilitasi jaringan irigasi, sehingga pengembangan sistem informasi digital belum menjadi sasaran utama dalam penetapan target tahunan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap dilakukan kegiatan pendataan dan digitalisasi jaringan irigasi sebagai bagian dari dukungan teknis terhadap program pengelolaan irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap melalui pemanfaatan sumber daya internal, optimalisasi sistem yang telah tersedia, serta integrasi dengan kegiatan survei dan monitoring lapangan.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, pada Tahun 2025 telah terealisasi digitalisasi data pada 44 daerah irigasi, yang mencakup informasi jaringan, kondisi infrastruktur, serta karakteristik pelayanan air. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempermudah akses informasi, serta mendukung proses perencanaan, operasi, dan evaluasi pengelolaan irigasi secara lebih efisien.

Keberhasilan realisasi ini menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital di bidang sumber daya air, meskipun belum ditetapkan sebagai target formal. Ke depan, capaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan target kinerja yang lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.23 Realisasi Jumlah Data SDA yang telah didigitasi

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realliasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien	Jumlah Data SDA yang telah didigitasi	Buah	0	44	488.89

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

2. Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu

Persentase daerah aman dari daya rusak air dilaksanakan melalui kegiatan struktural yang terfokus pada perkuatan tebing dan normalisasi sungai. Perkuatan tebing sungai bertujuan untuk meningkatkan stabilitas lereng dan mencegah terjadinya erosi serta longsor akibat tekanan dan kecepatan aliran air, khususnya pada saat debit banjir meningkat. Dengan kondisi tebing yang stabil dan terlindungi, risiko kerusakan lahan, permukiman, serta infrastruktur di sekitar sungai dapat diminimalkan.

Normalisasi sungai dilakukan melalui penataan kembali alur sungai, pengerukan sedimentasi, serta perbaikan penampang aliran guna meningkatkan kapasitas tampung dan kelancaran aliran air. Kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi potensi terjadinya luapan dan genangan pada musim hujan, sehingga mampu menekan risiko banjir yang dapat menimbulkan kerusakan di wilayah sekitarnya.

Sinergi antara perkuatan tebing dan normalisasi sungai memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan persentase daerah aman dari daya rusak air. Kedua kegiatan tersebut secara langsung menurunkan tingkat kerawanan terhadap erosi, longsor, dan banjir, serta memperkuat fungsi sungai sebagai saluran pengendali aliran. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur sungai, wilayah yang terlindungi menjadi semakin luas, sehingga persentase daerah yang aman dari ancaman daya rusak air dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 3.24 Realisasi Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air	Persen	15.75	25.23	160.19%

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Persentase aman dari daya rusak air diukur dari jumlah Panjang sungai dan perkuatan tebing berjalan dibagi dengan jumlah sungai dan perkuatan tebing yang telah dikerjakan. Target di tahun 2025 adalah sebesar 15,75%. Total Panjang sungai dan perkuatan tebing yang dikerjakan di tahun 2025 adalah 80,5616 Km, dan jumlah sungai dan perkuatan tebing yang telah dikerjakan adalah 319,3432 Km. Sehingga didapatkan persentase daerah aman dari daya rusak air adalah 25,23% dengan capaian kinerja 160,16%.

$$\frac{\text{Jumlah Panjang Sungai dan Perkuatan Tebing di Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Sungai dan Perkuatan Tebing yang telah di kerjakan}} \times 100\%$$
$$\frac{80,5616}{319,3432} \times 100\% = 25,23\%$$

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR Bidang Sumber Daya air yang menunjang dalam pengendalian daya rusak air :

- Pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang 0,9656 Km
- Normalisasi/restorasi sungai sepanjang 79,595 Km

3. Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian

Target Persentase Daerah Irigasi yang Terlayani ditetapkan sebesar 71,30%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan jaringan irigasi, realisasi pelayanan irigasi mencapai 71,44%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 100,20%, yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.25 Realisasi Persentase Daerah Irigasi Terlayani

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian	Persentase Daerah Irigasi yang terlayani	Persen	71,3	71,44	100,2%

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Persentase daerah irigasi yang terlayani diukur dari perbandingan luas areal yang dilayani dengan luas areal irigasi sesuai kewenangan ditambah dengan luas irigasi baru yang berfungsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas daerah irigasi yang terlayani adalah sebesar 7122 Ha dan luas areal irigasi sesuai kewenangan ditambah dengan luas irigasi baru yang berfungsi adalah 9970 Ha.

$$\text{Persentase DI Terlayani} = \frac{\text{Luas DI Terlayani}}{\text{Total Luas DI Potensial}} \times 100\%$$

$$\frac{7122}{9970} \times 100\% = 71,44\%$$

Capaian tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan sistem irigasi pada Tahun 2025 telah berjalan secara efektif, khususnya dalam aspek operasi dan pemeliharaan jaringan, pengaturan distribusi air, serta koordinasi dengan kelembagaan petani. Ketersediaan air yang relatif stabil dan kondisi jaringan yang cukup baik turut mendukung tercapainya target pelayanan irigasi.

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat potensi peningkatan pelayanan irigasi melalui pelaksanaan rehabilitasi jaringan, normalisasi saluran, serta peningkatan kapasitas pengelolaan air. Upaya tersebut perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Ke depan, peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan sistem pengelolaan irigasi akan menjadi fokus utama dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan persentase daerah irigasi yang terlayani secara berkelanjutan.

4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan

Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang lebih diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan fisik dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang bersifat mendesak, seperti perbaikan jaringan irigasi dan pengendalian daya rusak air.

Selain itu, penyesuaian kebijakan dan perencanaan program pada tahun berjalan menyebabkan fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pemenuhan target kinerja utama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan ketahanan infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan keterlibatan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini direncanakan untuk diintegrasikan kembali dalam program kerja tahun berikutnya melalui penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang lebih memadai.

Tabel 3.26 Realisasi Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA

Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target	Realliasi	Capaian
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA	Persen	100	0	0

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Secara rinci, capaian kinerja indikator per sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Persub Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air

Program, Kegiatan/ Kegiatan Sub	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realsiasi Anggaran Tahun 2025	
	Indikator	satuan	Output/ Outcome	Pagu Anggaran (Rp)	Output / Outcome	Pagu Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Data SDA yang telah didigitasi	Buah	0	0	44	0
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Irigasi	Instansi	0	0	0	0
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air	%	15,75	19.260.605.705	25,63	18.310.025.941
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Berfungsi Optimal	Km	0,4564	9.862.435.768	0,9656	9.698.698.200
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0,4564	9.862.435.768	0,9656	9.698.698.200
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Daerah yang Terlindungi dari Sedimentasi	Km	56,785	9.398.169.937	80,896	8.611.327.741
Normasliasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormaliasi/ restorasi	Km	56,785	9.398.169.937	80,896	8.611.327.741
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Daerah Irigasi yang terlayani	%	71,3	14.969.777.326	71,44	8.835.005.327
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Debit Air pada masing-masih Daerah Irigasi	Liter/ detik	58,6	2.844.523.485	76,86	2.794.063.015

Program, Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realsiasi Anggaran Tahun 2025	
		Indikator	satuan	Output/ Outcome	Pagu Anggaran (Rp)	Output / Outcome	Pagu Anggaran (Rp)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Km	13,445	2.045.485.085	37,005	1.997.163.465
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang jaringan irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Km	20,8	799.038.400	20,855	796.899.550
Pengembangan dan Penelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	%	56,14	12.125.253.841	56,27	6.040.942.312
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi Permukaan yang dibangun	Km	1,105	7.479.901.104	1,5163	1.459.950.812
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	Km	1,467	2.333.675.239	1,406	2.294.509.882
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhab	Km	1,357	1.520.167.498	1,159	1.505.666.468
Rehabilitasi Bendung Irigasi		Jumlah Bendung yang direhab	Unit	3	538.810.000	3	529.409.450
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3	252.700.000	3	251.405.700
Program Pengelolaan Sumber Daya Air		Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA	%	100	63.803.720	0	43.025.000
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah		Jumlah P3A yang diberdayakan	Orang	20	0	0	0
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	20	0	0	0

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. HSS

Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif dengan indikator Persentase Air Irigasi Tersedia tahun 2025 didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp34.294.186.751 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu. Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana Rp19.324.409.425 dan dibagi menjadi beberapa sub kegiatan, yaitu :

a) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp9.862.435.768 dengan target pembangunan sepanjang 456,4 meter. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 965,6 meter, realisasi anggaran mencapai Rp9.698.698.200 atau sekitar 98,34% dari total pagu anggaran. Capaian fisik yang melampaui target dengan serapan anggaran yang tetap terkendali menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Faktor pendukung utama dalam kegiatan perkuatan tebing adalah tersedianya perencanaan teknis yang komprehensif dan berbasis data lapangan yang akurat. Analisis hidrologi, hidrolika, dan geoteknik yang memadai memungkinkan perancang menentukan dimensi, tipe struktur, serta sistem perlindungan yang sesuai dengan kondisi sungai dan tanah setempat. Perencanaan yang matang akan meminimalkan risiko kegagalan struktur akibat kesalahan desain.

Ketersediaan material yang memenuhi standar mutu juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Penggunaan batu yang keras dan tidak mudah lapuk, kawat bronjong yang tahan korosi, serta mortar dengan mutu sesuai spesifikasi akan meningkatkan kekuatan dan daya tahan bangunan. Selain itu, ketersediaan alat berat dan peralatan kerja yang memadai mendukung kelancaran proses konstruksi di lapangan.

Dari aspek pelaksanaan, kompetensi tenaga kerja dan kualitas pengawasan lapangan berperan besar dalam menjamin mutu pekerjaan. Tenaga teknis yang berpengalaman mampu menerapkan metode kerja

sesuai standar, sedangkan pengawasan yang konsisten dapat mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan sejak dini. Koordinasi yang baik antara pemilik pekerjaan, konsultan, dan kontraktor juga mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sistem drainase dan perlindungan tambahan yang memadai. Pemasangan lapisan filter, geotekstil, saluran drainase, serta perlindungan kaki tebing mampu mengurangi tekanan air pori dan mencegah gerusan dasar. Dukungan masyarakat sekitar, kemudahan akses lokasi, serta kondisi sosial yang kondusif turut memperlancar pelaksanaan proyek. Selain itu, adanya program pemeliharaan pasca-konstruksi menjadi faktor pendukung jangka panjang dalam menjaga fungsi bangunan.



Kegiatan Pembangunan Perkuatan Tebing

- b) Normalisasi/Restorasi Sungai pada Tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp9.398.169.937,00 dengan target penanganan sepanjang 56,785 km. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik mencapai 80,896 km. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp8.611.327.741,00 atau 91,63% dari pagu anggaran. Perbandingan antara capaian fisik dan serapan anggaran menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian biaya yang cukup baik.

Peningkatan panjang penanganan sungai dari target awal terjadi karena dalam pelaksanaan ditemukan beberapa segmen tambahan yang dapat ditangani dalam satu rangkaian pekerjaan tanpa memerlukan perubahan signifikan terhadap struktur biaya. Selain itu, metode pelaksanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi eksisting alur sungai

memungkinkan percepatan pekerjaan pengerukan sedimentasi, perapian penampang, serta penataan alur.

Faktor pendukung utama adalah tersedianya perencanaan dalam menentukan volume pengerukan, lebar alur, elevasi dasar sungai, serta konsep penataan bantaran. Perencanaan yang matang memungkinkan penyesuaian desain dengan karakteristik lokal dan potensi risiko.

Ketersediaan peralatan yang memadai juga menjadi faktor penting. Penggunaan alat berat yang sesuai akan memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dukungan pendanaan yang cukup memungkinkan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis tanpa pengurangan mutu.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi yang baik antarinstansi, konsultan, kontraktor, dan pemerintah daerah mendukung kelancaran proyek. Pengawasan yang konsisten, sistem pengendalian mutu akan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Dukungan masyarakat dan kemudahan akses lokasi juga mempercepat pelaksanaan di lapangan.



Normalisasi Sungai di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang

- c) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp63.803.720. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyelenggaraan Sidang Komisi Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebagai forum koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan irigasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp43.025.000 atau sekitar 67,46% dari pagu anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan sidang, fasilitasi peserta, penyusunan bahan pembahasan, serta kegiatan pendukung lainnya.

Sementara itu, kegiatan pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang semula direncanakan sebagai bagian dari program pemberdayaan kelembagaan tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun kegiatan, sehingga sebagian alokasi dana mengalami penyesuaian dan refocusing untuk mendukung program prioritas lainnya.

Meskipun pelatihan P3A belum dapat dilaksanakan, kegiatan Sidang Komisi Irigasi tetap memberikan kontribusi positif terhadap penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air. Forum tersebut menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi, menyusun rekomendasi teknis, dan menetapkan arah kebijakan irigasi daerah.

Ke depan, kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas P3A akan kembali diprioritaskan dalam perencanaan tahun berikutnya agar peran kelembagaan petani dalam pengelolaan irigasi dapat semakin optimal dan berkelanjutan.



Sidang Komisi Irigasi Tahun 2025

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.969.777.326 dan dibagi menjadi beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp7.479.901.104 dengan target pembangunan sepanjang 1,105 km. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 1,5163 km, sehingga tingkat capaian fisik mencapai sekitar 137,27% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.459.950.812 atau sekitar 19,52% dari total pagu anggaran. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan kegiatan konstruksi secara menyeluruh akibat proses pembebasan lahan pada Daerah Irigasi (DI) Amandit yang masih berjalan.

Dari total 48 persil lahan yang direncanakan untuk pembebasan, baru 19 persil yang telah dilakukan konsinyasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian administrasi dan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian paket pekerjaan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana awal, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi keuangan.

Meskipun demikian, pada segmen-segmen yang telah bebas lahan, pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara optimal sehingga realisasi fisik mampu melampaui target. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada lokasi yang tidak mengalami kendala lahan.

Ke depan, percepatan penyelesaian pembebasan lahan dan konsinyasi akan menjadi prioritas utama agar sisa anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pembangunan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan perencanaan.

Faktor pendukung utama pembangunan jaringan irigasi permukaan adalah tersedianya perencanaan teknis yang akurat dan berbasis data. Analisis hidrologi, kebutuhan air tanaman, kondisi topografi, serta karakteristik tanah menjadi dasar dalam menentukan kapasitas saluran,

elevasi bangunan, dan sistem pembagian air. Perencanaan yang matang memungkinkan sistem irigasi berfungsi optimal dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketersediaan sumber air yang cukup dan stabil juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Debit sungai atau tampungan air yang memadai akan menjamin kontinuitas suplai air sepanjang tahun. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai memungkinkan penggunaan material berkualitas, pelaksanaan konstruksi sesuai spesifikasi, serta pengawasan yang optimal.

Dari aspek pelaksanaan, kompetensi tenaga kerja, penggunaan peralatan yang sesuai, serta penerapan metode kerja standar sangat mendukung mutu pembangunan. Pengawasan lapangan yang konsisten dan koordinasi yang baik antara pemilik kegiatan, konsultan, dan kontraktor akan meminimalkan kesalahan teknis. Keterlibatan petani dan kelembagaan pengelola irigasi dalam proses pembangunan juga memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan sistem.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sistem bangunan pelengkap yang lengkap, seperti bangunan bagi, sadap, ukur, dan pengatur. Keberadaan bangunan ini memungkinkan distribusi air dilakukan secara adil dan terkontrol. Selain itu, dukungan lingkungan yang baik, seperti kondisi daerah tangkapan air yang terjaga dan minim erosi, turut meningkatkan kinerja jaringan irigasi.



Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

- b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.333.675.239,00 dengan target peningkatan jaringan sepanjang 1,467 km. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 1,406 km, sehingga tingkat capaian fisik mencapai sekitar 95,84% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2.294.509.882 atau sekitar 98,32% dari total pagu anggaran. Tingginya serapan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Belum tercapainya target panjang penanganan disebabkan oleh adanya penambahan item pekerjaan pada bendung dan bangunan bagi. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan untuk meningkatkan fungsi pengaturan dan distribusi air agar lebih optimal. Penyesuaian ini berdampak pada alokasi volume dan biaya pekerjaan, sehingga panjang saluran yang dapat ditingkatkan menjadi sedikit lebih pendek dari rencana awal.

Meskipun realisasi panjang jaringan belum sepenuhnya mencapai target tahunan, tambahan pekerjaan pada bendung dan bangunan bagi memberikan nilai manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kinerja sistem irigasi secara keseluruhan, khususnya dalam aspek pengendalian debit, pemerataan distribusi air, dan peningkatan efisiensi pelayanan.



Peningkatan DI. Pacakan Kec. Kalumpang

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.520.167.496 dengan target output sepanjang 1,357 km. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 1,159 km, sehingga tingkat capaian fisik mencapai sekitar 85,41% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.505.666.468 atau sekitar 99,05% dari total pagu anggaran. Tingginya serapan anggaran menunjukkan bahwa pekerjaan rehabilitasi telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.

Perbedaan capaian output tersebut disebabkan oleh adanya perubahan pada item pekerjaan serta penyesuaian penampang saluran selama proses pelaksanaan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, khususnya terkait dimensi saluran, stabilitas tanah, serta kebutuhan teknis untuk menjamin fungsi hidraulik yang lebih optimal. Perubahan tersebut berdampak pada peningkatan volume pekerjaan per segmen, sehingga panjang penanganan yang dapat direalisasikan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan target awal.

Meskipun realisasi panjang saluran belum sepenuhnya mencapai target, kualitas hasil pekerjaan telah disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan standar konstruksi yang berlaku. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk memastikan keberfungsian jaringan irigasi secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi distribusi air, serta meminimalkan potensi kerusakan di masa mendatang.

Perencanaan teknis akan dilakukan dengan survei yang lebih rinci dan estimasi volume yang lebih akurat agar target output fisik dapat lebih sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.



Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pamujaan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

- d. Rehabilitasi Bendung Irigasi pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp538.810.000 dengan target rehabilitasi sebanyak 3 unit bendung irigasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang dicapai adalah sebanyak 3 unit bendung irigasi, sehingga tingkat capaian kinerja fisik mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp529.409.450 atau sekitar 98,26% dari total pagu anggaran. Tingginya serapan anggaran menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi bendung irigasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bendung irigasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan baik dari sisi teknis maupun jadwal pelaksanaan. Seluruh bendung yang direhabilitasi telah disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan fungsi pengambilan dan pengaturan air untuk mendukung pelayanan irigasi secara optimal.

Keberhasilan pencapaian target ini juga mencerminkan efektivitas perencanaan, pengawasan, serta koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan kondisi bendung yang lebih andal, diharapkan distribusi air ke jaringan irigasi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.



Rehabilitasi Bendung DI. Desa Baru Kec. Sungai Raya
Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

- e. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 252.700.000,00 dengan target penyusunan sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi yang dicapai juga sebanyak 3 dokumen, sehingga tingkat capaian kinerja fisik mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp251.405.700,00 atau sekitar 99,49% dari total pagu anggaran. Tingginya serapan anggaran menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan dokumen telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup telah berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun waktu pelaksanaan. Dokumen yang dihasilkan telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Hasil penyusunan dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, tertib, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan dokumen lingkungan hidup juga berperan penting dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air.

Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan koordinasi antar pihak terkait dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur irigasi dan rawa secara berkelanjutan.

Adapun tiga dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan dalam kegiatan ini meliputi :

1. EPAKSI (Evaluasi dan Perencanaan Kinerja Sistem Irigasi
2. Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di beberapa kecamatan di kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Pemutakhiran Data Teknis Jaringan Irigasi Kewenangan kabupaten Hulu Sungai Selatan

- f. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar 2.045.485.085 dengan target penanganan sepanjang 13,445 km. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 37,003 km, sehingga tingkat capaian fisik mencapai sekitar 275,25% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai Rp1.997.163.465 atau sekitar 97,64% dari total pagu anggaran. Tingginya capaian fisik yang melampaui target dengan serapan anggaran yang tetap terkendali menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta adanya penyesuaian metode kerja yang memungkinkan penanganan jaringan dalam cakupan yang lebih luas tanpa penambahan anggaran yang signifikan. Selain itu, dukungan kondisi cuaca dan koordinasi yang baik antar pelaksana turut memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan fungsi jaringan irigasi, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi air, mengurangi potensi kerusakan, serta mendukung keberlanjutan pelayanan irigasi kepada masyarakat. Capaian ini akan menjadi dasar dalam penyusunan target yang lebih realistis dan proporsional, serta dalam penguatan sistem perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

- g. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran Rp799.038.400 dengan target penanganan jaringan sepanjang 20,8 km. Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan, realisasi fisik yang tercapai adalah sepanjang 20,855 km, sehingga tingkat capaian fisik mencapai sekitar 100,26% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran mencapai Rp796.899.550 atau sekitar 99,73% dari total pagu anggaran. Capaian fisik yang melampaui target dengan serapan anggaran yang tetap terkendali menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa telah berjalan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh perencanaan teknis yang matang, pelaksanaan pekerjaan yang terkoordinasi dengan baik, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya di lapangan. Selain itu, penyesuaian metode kerja sesuai dengan kondisi karakteristik lahan rawa turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Capaian tersebut memberikan dampak positif terhadap keberfungsian jaringan irigasi rawa, khususnya dalam menjaga kelancaran tata air, mencegah genangan berlebih, serta mendukung produktivitas lahan pertanian rawa secara berkelanjutan. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa akan terus dioptimalkan guna mempertahankan kinerja sistem serta meningkatkan kualitas pelayanan irigasi di wilayah rawa.



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Air tahun 2025

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.28 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Air Irigasi Tersedia

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja (a)	Realisasi Kinerja (b)	Capaian Kinerja © = (b/a)x100	Pagu Anggaran (d)	Realisasi Anggaran (e)	Capaian Anggaran (f)=e/d x100	Efisiensi (g) =c/f	Ket
1	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	persentase air irigasi tersedia	69,90	70,29	100,56	Rp. 34.294.186.751	Rp. 27.188.056.268	79,28	1,267	Efisien

Sumber : Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. HSS

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja indikator Persentase Air Irigasi Tersedia telah dilaksanakan secara efisien dalam pencapaian target kinerja.

SASARAN STRATEGIS V
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari meningkatnya sasarannya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah adalah **Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis atas Realisasi dengan Target Kinerja

Meningkatnya kualitas layanan internal pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai sasaran strategis penunjang dalam pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun sebagai penunjang, peran kualitas layanan internal pada Perangkat Daerah juga sangat penting, karena merupakan hal yang mendasar dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan responsif sebelum memberikan pelayanan yang lebih luas

kepada masyarakat pengguna layanan.

Pengukuran keberhasilan dari sasaran meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah melalui pengolahan data survei yang dilakukan kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku penerima layanan terhadap kondisi layanan internal yang optimal sebagai penunjang kelancaran pencapaian kinerja utama urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

Persentase kepuasan pegawai adalah persentase persepsi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap layanan proses penyusunan perencanaan, layanan keuangan dan layanan umum kepegawaian dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan dibandingkan jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku responden.

Adapun formulasi dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

= $\frac{\text{Jumlah persepsi layanan memuaskan dan sangat memuaskan}}{\text{Jumlah responden}} \times 100$

= $\frac{93,04}{100} \times 100$

= 93,04 %

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.29 Data Responden

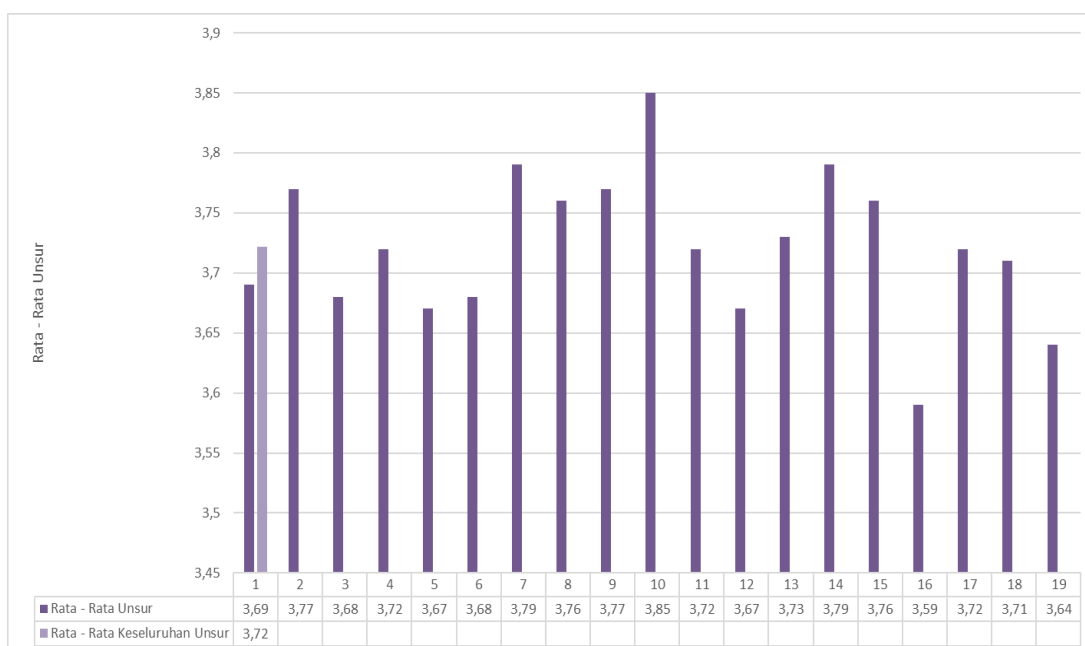
NO	KARAKTER	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	65	65%
		Perempuan	35	35%
2	Usia	< 25 Th	7	8,60%
		25 Th – 35 Th	44	42,00%
		36 Th – 45 Th	31	38,30%
		>45 Th	18	11,10%
3	Pekerjaan	ASN	100	100%
4		S2 (Magister)	2	2%

NO	KARAKTER	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
	Tingkat Pendidikan	S1 (Sarjana)	59	59%
		D3 (Diploma)	10	10%
		SMA / Sederajat	29	29%

Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kab. HSS

Adapun jenis pelayanan internal dan indeks kepuasan pelayanan nya dapat di lihat pada grafik dan tabel berikut ini:

Grafik 3.. Grafik Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Sekretariat Per Unsur



Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kab. HSS

Tabel 3.30 Indeks Kepuasan Pegawai Per Jenis Layanan

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata (1-4)	KONVERSI (RATA - RATA UNSUR x 25)	Mutu Pelayanan
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,69	93,25	Puas
2	Penyediaan Komponen Alat Listrik	3,77	94,25	Sangat Puas
3	Penyediaan Barang Cetak (Map, Amplop, dll)	3,68	92	Puas
4	Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan	3,72	93	Sangat Puas
5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3,67	91,75	Sangat Puas
6	Alat/Bahan Pembersih & Pengharum	3,68	92	Puas

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata (1-4)	KONVERSI (RATA - RATA UNSUR x 25)	Mutu Pelayanan
7	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	3,79	94,75	Sangat Puas
8	Jasa Komunikasi, Air & Listrik	3,76	94	Sangat Puas
9	Jasa Pelayanan Umum (Petugas Kebersihan, Keamanan)	3,77	94,25	Sangat Puas
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3,85	96,25	Sangat Puas
11	Layanan Kepegawaian	3,72	93	Sangat Puas
12	Layanan Keuangan Berbasis Online	3,67	91,75	Puas
13	Kemudahan Prosedur Pencairan Dana	3,73	93,25	Sangat Puas
14	Kesesuaian Pelayanan (Adil dan Tepat Waktu)	3,79	94,75	Sangat Puas
15	Layanan Konsultasi Keuangan	3,76	94	Sangat Puas
16	Kemudahan Akses Sistem Keuangan Online	3,59	89,75	Puas
17	Kesesuaian Informasi Keuangan	3,72	93	Sangat Puas
18	pengadaan Kendaraan Operasional	3,71	92,75	Sangat Puas
19	Pengadaan Peralatan & Mesin lainnya	3,64	91	Puas
RATA – RATA KESELURUHAN NILAI UNSUR		3,72		Sangat Puas
RATA – RATA KESELURUHAN NILAI KONVERSI			93,04	Sangat Puas

Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kab. HSS

Berikut dtampilkan tabel perbandingan antara target kinerja dengan realisasinya untuk indikator persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah tahun 2025 :

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Kinerja indikator persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	93,04%	93,04%

Sumber : E-SAKP Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat realisasi sedikit lebih rendah dari target, namun dengan capaian 93,04% sudah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan perangkat daerah berada pada kategori sangat puas.

b. Analisis atas Realisasi dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah dengan indikator Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah ini merupakan indikator baru di tahun 2025, sehingga tidak didapat data pembandingan capaian kinerja untuk tahun sebelumnya.

c. Analisis Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Realisasi kinerja meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 93,04%, sementara pada akhir perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di tetapkan targetnya adalah 100%. Terdapat deviasi sebesar 6,96 poin yang masih harus terus diupayakan pencapaiannya agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis Realisasi Dengan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Lainnya dan Standar Nasional

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah ini sejalan dengan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dalam RPJMN 2025-2029 yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan profesional. Namun karena indikator yang di gunakan berbeda, sehingga tidak ditemukan data sebagai pembandingnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengolahan data survei yang telah dilakukan, secara umum persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah terhadap pelayanan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kategori Sangat Puas, dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,72 dan nilai konversi 93,04.

Namun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan dengan nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Adapun tiga nilai terendah

diantaranya, pertama unsur kemudahan akses sistem keuangan *online* dengan nilai rata – rata 3,59, kedua unsur pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan nilai rata – rata 3,65, serta terakhir unsur layanan keuangan berbasis *online* dengan nilai rata – rata 3,67. Ketiga unsur tersebut walaupun menjadi tiga nilai terendah, namun masih dalam kategori puas.

Beberapa kategori yang masih perlu perbaikan ke depannya akan lebih ditingkatkan dan menjadi acuan agar dapat memberikan pelayanan prima, sehingga ekspektasi pegawai terhadap kepuasan pelayanan dapat terpenuhi dan pelayanan yang telah mendapatkan nilai sangat puas dapat dipertahankan oleh pengampu tugas di sekretariat pada pelayanan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen Pimpinan, berupa Dukungan Kebijakan dan anggaran untuk perubahan
2. Kompetensi SDM, berupa Keahlian teknis dan sikap melayani dari para pegawai
3. Digitalisasi, berupa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi
4. Kejelasan SOP, berupa Alur kerja yang baku, transparan, dan tidak berbelit-belit
5. Budaya Kerja, berupa lingkungan yang kolaboratif dan berorientasi pada kinerja

Faktor Eksternal

1. Regulasi Pusat, berupa Standar dari KemenPAN-RB atau Kemendagri terkait Reformasi Birokrasi
2. Kemajuan Teknologi, berupa perkembangan perangkat lunak dan infrastruktur IT terbaru.
3. Ekspektasi Publik berupa Tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan transparan
4. Pengawasan/Audit, Penilaian kinerja dari Ombudsman, BPK, atau Inspektorat.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Mendukung Pencapaian Kinerja dan Foto-Foto Hasil Kegiatan

Dalam upaya pencapaian kinerja Meningkatnya kualitas layanan Internal

Perangkat Daerah, maka program yang menjadi pendukung utama pencapaian kinerjanya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bukan sekedar aktivitas rutin administrasi semata, melainkan instrumen yang strategis guna memastikan semua kegiatan organisasi perangkat daerah berjalan efektif untuk mencapai target kinerja utamanya.

Untuk tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai pagu anggaran sebesar Rp34.212.370.114 dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.663.243.728 atau hanya sebesar 31,17% dari total pagu anggaran program. Minimnya angka realisasi ini berkaitan dengan tidak dapat terlaksananya pengadaan beberapa jenis alat besar dikarenakan faktor waktu pengiriman alat besar dari produsen sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan proses karoseri alat besar yang di perkirakan akan sampai dan selesai melewati tahun anggaran 2025, sehingga diambil keputusan untuk menunda pengadaan alat-alat besar tersebut.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota beserta pagu dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2025		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		11.643.239.314	8.014.343.729	68,83
KEGIATAN : perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7.361.400	4.548.810	61,79
1	SUB KEGIATAN : penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.857.500	3.982.410	67,99
2	SUB KEGIATAN : evaluasi kinerja perangkat daerah	1.503.900	566.400	37,66
KEGIATAN : administrasi keuangan perangkat daerah		9.551.989.604	6.602.098.256	69,12
3	SUB KEGIATAN : penyediaan gaji dan tunjangan asn	9.547.736.204	6.600.469.856	69,13
4	SUB KEGIATAN : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1.656.000	531.000	32,07

Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2025			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5	SUB KEGIATAN : koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd		1.503.900	566.400	37,66
6	SUB KEGIATAN : penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		1.093.500	531.000	48,56
KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30.775.000	15.000.000	48,74
7	SUB KEGIATAN : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		30.775.000	15.000.000	48,74
KEGIATAN : administrasi umum perangkat daerah			589.963.360	540.052.456	91,54
8	SUB KEGIATAN : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.043.000	4.920.000	97,56
9	SUB KEGIATAN : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		235.020.660	203.710.500	86,68
10	SUB KEGIATAN : penyediaan bahan logistik kantor		56.000.000	41.875.000	74,78
11	SUB KEGIATAN : penyediaan barang cetakan dan penggandaan		58.249.700	57.946.000	99,48
12	SUB KEGIATAN : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		650.000	610.000	93,85
13	SUB KEGIATAN : penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		235.000.000	230.990.956	98,29
KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.569.130.800	2.648.899.999	11,74
14	SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		929.020.000	595.399.999	64,09
15	SUB KEGIATAN : Pengadaan Alat Besar		21.640.110.800	2.053.500.000	9,49
KEGIATAN : penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			586.300.200	447.264.674	76,29
16	SUB KEGIATAN : penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		242.404.200	171.585.094	70,78
17	SUB KEGIATAN : penyediaan jasa pelayanan umum kantor		343.896.000	275.679.580	80,16
KEGIATAN : pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			876.849.750	405.379.533	46,23
18	SUB KEGIATAN : penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		862.449.750	393.909.533	45,67

Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2025			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
19	SUB KEGIATAN : pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		-	-	-
20	SUB KEGIATAN : pemeliharaanrehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		14.400.000	11.470.000	79,65

Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kab. HSS




Pengisian survey terkait kualitas pelayanan internal perangkat daerah

Sumber : Foto-foto hasil kegiatan Sekretariat tahun 2025

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Karena realisasi untuk capaian indikator persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah di bawah 100%, maka tidak dilakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun sebelumnya (tahun 2024) telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Nomor: 700.1.2/030-KHUSUS/ITDA tanggal 11 April 2025 dengan beberapa rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.33 Matrik Tindak lanjut Atas Rekomendasi Hasil AKIP Internal Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Perangkat Daerah agar memastikan pohon kinerja telah sesuai dengan isu strategis sebagai dasar perencanaan 2025-2029 serta memastikan penjenjangan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SIPD pada seluruh Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Telah disusun Pohon Kinerja yang disesuaikan dengan isu strategis DPUTR untuk jangka waktu 2025-2029, diikuti dengan telah diimplemetasikannya pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di SIPD	1 Dokumen	Mei	Sekretaris	Selesai
2	Mengupdate secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SAKP dengan data dukung yang lengkap dan valid	Dilakukan update secara berkala capaian kinerja DPUTR pada aplikasi e-SAKP dengan data dukung yang lengkap dan valid	4 kegiatan	Maret, Juni, September, Desember	Kasubbag Perencanaan	Berproses di setiap triwulan
3	Perangkat Daerah agar melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKP untuk mencapai pemenuhan target kinerja	Dilakukan pelaporan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKP untuk mencapai pemenuhan target kinerja	4 kegiatan	Maret, Juni, September, Desember	Kasubbag Perencanaan	Berproses di setiap triwulan
4	Perangkat Daerah agar mengakses dan memantau e-SAKP secara berkala untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai rewiu secara berjenjang oleh internal Perangkat Daerah terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan	Dilaksanakan pemantauan e-SAKP secara berkala serta melakukan rewiu secara berjenjang terhadap tindak lanjut rekomendasi	4 kegiatan	Maret, Juni, September, Desember	Kepala Dinas	Berproses di setiap triwulan

Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kab. HSS

Terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan pohon kinerja telah dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 2025-2029, diikuti dengan telah diimplemetasikannya pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di SIPD.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Laporan kinerja melalui sub bagian Perencanaan melakukan update secara berkala terhadap capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada aplikasi e-SAKP dengan data dukung yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan.
- c. Pelaporan terhadap hasil kinerja juga dilakukan secara berkala di lengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SAKP.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala melakukan pemantauan terhadap e-SAKP serta melakukan reviu secara berjenjang terhadap tindak lanjut rekomendasi.

3.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja/Rencana Tindak Lanjut di Tahun 2026

Berdasarkan uraian analisis kinerja dapat disusun rekomendasi/rencana tindak lanjut di tahun 2026 untuk peningkatan kinerja sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.34 Rencana Tindak Lanjut

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Persentase infrastruktur fisik dalam kondisi baik	Keberhasilan: 1. Realisasi tahun 2025 sebesar 73,45% melampaui target 69,81% (capaian kinerja 109,94%), menunjukkan peningkatan kualitas dan keberfungsian infrastruktur daerah. 2. Optimalisasi program pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan, jembatan, bangunan gedung, dan prasarana umum. 3. Capaian bangunan gedung dalam kondisi baik 100%, memberi kontribusi signifikan terhadap rata-rata indikator. 4. Peningkatan akses sanitasi layak sebesar 80,57% melalui perluasan layanan dan meningkatnya kesadaran masyarakat. 5. Koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan lapangan yang lebih efektif sehingga mutu pekerjaan terjaga. 6. Efisiensi penggunaan anggaran dengan output yang optimal. Kendala/area yang masih perlu ditingkatkan: 1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik masih 61,59%. 2. Persentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih relatif rendah (48,83%), berpotensi menghambat peningkatan kualitas infrastruktur jika tidak ditingkatkan	1. Peningkatan kegiatan pemeliharaan infrastruktur (rutin dan berkala) pada jalan, jembatan, gedung, dan prasarana umum. 2. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta pengawasan teknis lapangan secara lebih intensif. 3. Perluasan layanan sanitasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi sehat. 4. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk mendukung capaian output fisik yang optimal. 5. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lintas unit/perangkat daerah secara lebih efektif.	1. Meningkatkan alokasi pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan prioritas pada ruas/jembatan rusak ringan agar tidak menjadi rusak berat. 2. Memperluas program sertifikasi tenaga kerja konstruksi melalui fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi keahlian. 3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan mutu, ketahanan, dan kesesuaian spesifikasi pekerjaan. 4. Meningkatkan sinergi lintas perangkat daerah dan stakeholder dalam mendukung kualitas infrastruktur dan sanitasi. 5. Menerapkan perencanaan berbasis data kondisi infrastruktur (evidence-based planning) untuk penentuan prioritas pembangunan dan pemeliharaan.

Sasaran	Indikator	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/RTL
Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Cakupan Masyarakat di Kawasan Perdesaan yang terlayani air bersih	Target kinerja tahun 2025 sebesar 83,65 persen dapat dicapai sesuai dengan realisasi karena pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan air minum perdesaan berjalan sesuai perencanaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh perluasan SPAM perdesaan yang tepat sasaran, penguatan jaringan perpipaan, serta adanya koordinasi yang baik antara Dinas PUPR dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima manfaat memastikan kegiatan sesuai dengan kondisi teknis di lapangan.	Melaksanakan perluasan SPAM perdesaan melalui penambahan sambungan rumah (SR).	Meningkatkan target capaian cakupan layanan air bersih secara bertahap pada tahun berikutnya.
			Melaksanakan perluasan jaringan perpipaan sebagai penguatan sistem SPAM eksisting.	Melanjutkan perluasan SPAM pada desa dengan tingkat layanan terendah.
			Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dan pemeliharaan SPAM bagi pengelola HIPPAM di 44 desa.	Memperkuat kapasitas pengelola HIPPAM agar keberlanjutan layanan air minum tetap terjaga.
			Melakukan pendataan serta verifikasi lapangan calon penerima manfaat untuk memastikan ketepatan sasaran	Mengintegrasikan perluasan jaringan perpipaan dengan penambahan sambungan rumah agar dampak terhadap indikator kinerja lebih optimal.
Terpenuhinya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tata Ruang Yang Sesuai dengan RTRW	Realisasi indikator Persentase Tata Ruang yang Sesuai dengan RTRW pada tahun 2025 mencapai 83,06%, menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya serta melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik, terutama antara OPD teknis, perizinan, dan pengawasan, Pemanfaatan data dan informasi tata ruang yang memadai, termasuk peta RTRW dan sistem informasi pendukung.	Pelaksanaan pembinaan dan penertiban bertahap terhadap pemanfaatan ruang yang belum sesuai RTRW.	Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan frekuensi monitoring dan penertiban pelanggaran.
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang.	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan pengawas tata ruang melalui pelatihan teknis dan bimbingan.
			Koordinasi intensif lintas sektor dalam proses perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Optimalisasi sistem informasi tata ruang berbasis digital untuk mendukung evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang secara lebih akurat dan cepat.
			Pemutakhiran data dan peta tata ruang sebagai dasar pengambilan keputusan.	Peningkatan koordinasi lintas OPD dan pemerintah kecamatan/desa dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	persentase air irigasi tersedia	Keberhasilan pencapaian persentase air irigasi tersedia pada Tahun 2025, yang mencapai 70,29%, dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air yang memadai, kondisi jaringan irigasi yang baik, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang optimal, manajemen distribusi air yang efektif, akurasi data dan perencanaan, kondisi lingkungan daerah aliran sungai, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan.	Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi secara bertahap, termasuk perbaikan kebocoran, pelapisan saluran, dan penanganan sedimentasi untuk mengurangi kehilangan air.	Optimalisasi operasi dan pemeliharaan (OP) rutin melalui penjadwalan pemeliharaan berkala dan pengawasan lapangan yang konsisten; percepatan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan berdasarkan skala prioritas; peningkatan kualitas dan akurasi data hidrologi serta perhitungan Kebutuhan Air Irigasi (KAI) sebagai dasar perencanaan distribusi air; serta penguatan kapasitas dan peran P3A melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan partisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.
			Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi P3A untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan irigasi di tingkat petani.	
			Menyusun prioritas kegiatan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan agar penggunaan anggaran lebih efektif.	
			Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, petani, dan instansi terkait dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.	
Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	Meskipun belum mencapai angka target 100%, persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah tetap bisa dikatakan berhasil karena berada di angka 93,04 atau kategori sangat puas. Keberhasilan ini tidak lepas dari faktor Kecepatan Respon, Kemudahan Prosedur, Komunikasi yang Transparan, Empati dan Sikap Petugas, serta Kualitas Solusi yang tepat sasaran.	Digitalisasi Layanan Internal, Penyederhanaan Prosedur, Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta evaluasi kerja melalui pelaksanaan survey layanan internal	Meningkatkan pelayanan internal melalui perbaikan sistem dan prosedur, meningkatkan kapasitas SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana kerja

Sumber : Dinas PUPR Kab. HSS

3.5 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) yang kemudian dilakukan pergeseran anggaran pada sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp312.952.514.016 yang digunakan untuk melaksanakan 9 Program, 20 Kegiatan, dan 65 Sub Kegiatan. Dari pagu anggaran tersebut, total realisasi anggaran adalah sebesar Rp209.344.467.002 atau 66,89%. Dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025

Kode Rek	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
5.1.01	Belanja Pegawai	9.547.736.204	6.600.469.856	69,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.171.824.871	46.130.956.052	86,76
5.1.02	Belanja Hibah	30.249.794.400	8.832.167.754	29,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.583.232.800	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.688.342.050	2.762.073.999	12,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.912.333.000	42.809.592.433	95,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.799.250.691	102.209.206.908	71,58
Jumlah		312.952.514.016	209.344.467.002	66,89

Sumber : LRA TA. 2025

Pada tahun 2025 komposisi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh jenis Belanja Modal mencapai 70,29%, sedangkan sisanya adalah belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai sebesar 3,05%, Belanja barang dan jasa sebesar 16,99%, dan Belanja Hibah sebesar 9,67%. Hal ini sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka terselenggaranya layanan infrastruktur yang prima, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung

aktivitas masyarakat.

Akuntabilitas keuangan menjelaskan realisasi anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Adapun anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai kinerja pada masing-masing sasaran strategis terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kondisi infrastruktur fisik yang andal dan berfungsi optimal	Program penyelenggaraan jalan	127.515.894.485	89.216.409.877	69.96
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.736.658.770	3.651.137.660	97.71
		Program Penataan Bangunan Gedung	82.804.462.339	57.550.576.238	69.5
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.554.050.234	12.300.816.653	66.3
		Program pengembangan jasa konstruksi	2.092.050.641	1.120.875.201	53.58
2	Meningkatnya akses dan keterlayanan masyarakat terhadap sistem distribusi air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.408.245.500	4.457.535.115	60.17
3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	Program penyelenggaraan penataan ruang	2.334.595.182	1.444.649.781	61.88
4	Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan air irigasi bagi lahan pertanian produktif	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	34.294.186.751	27.188.056.268	79,28
5	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	34.212.370.114	10.663.243.728	31.17

Pada tabel 3.34 di atas menunjukkan bahwa realisasi keuangan pada masing-masing program untuk menunjang pencapaian sasaran strategis belum terlalu tinggi, hal ini dikarenakan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Perencanaan Kegiatan

Sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal, sehingga dokumen perencanaan teknis perlu dilakukan penyesuaian.

2. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan

Beberapa kegiatan memerlukan tahapan perencanaan teknis dan proses pengadaan yang relatif panjang, sehingga tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

3. Penyesuaian Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Adanya perubahan kebijakan dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah menyebabkan sebagian kegiatan yang telah dianggarkan ditunda pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih mendesak.

4. Kendala Teknis

Pelaksanaan kegiatan menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan lahan, permasalahan pembebasan lahan, kondisi geografis.

5. Kendala Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal akibat gagal lelang, sanggahan, maupun keterbatasan penyedia yang memenuhi persyaratan teknis.

6. Keterbatasan Kapasitas Penyedia Jasa

Pada beberapa kegiatan, keterbatasan kapasitas penyedia jasa berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Perubahan Kebutuhan Teknis Kegiatan

Adanya perubahan kebutuhan teknis, termasuk penyesuaian spesifikasi atau volume pekerjaan, menyebabkan sebagian anggaran tidak terserap.

Bab IV berisi :

- ❖ *Ketercapaian Kinerja*
- ❖ *Faktor Penunjang*
- ❖ *Upaya Langkah ke Depan*

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Fisik Yang Andal Dan Berfungsi Optimal, dengan indikator Persentase Infrastruktur Fisik Dalam Kondisi Baik dari target 69.81% terealisasi 76.75% dengan persentase capaian sebesar 109.94%
 - b. Meningkatnya Akses Dan Keterlayanan Masyarakat Terhadap Sistem Distribusi Air Bersih, dengan indikator Cakupan Masyarakat Di Kawasan Perdesaan yang Terlayani Air Bersih, dari target 83.65% terealisasi 83.65% atau 100% capaian kinerja.
 - c. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang Ditetapkan, dengan indikator Persentase Tata Ruang y Sesuai dengan RTRW dari target 79.17% terealisasi 83.06% dengan persentase capaian sebesar 104.91%.
 - d. Meningkatnya Ketersediaan Dan Keberlanjutan Layanan Air Irigasi Bagi Lahan Pertanian Produktif, dengan indikator Persentase Air Irigasi Tersedia, dari target 69.90% terealisasi 70.29% dengan persentase capaian sebesar 100.56% .
 - e. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Kepuasan Pegawai Pada Layanan Internal Perangkat Daerah, dari target 100 % terealisasi 94,03% dengan persentase capaian sebesar 94,03%, berada pada kategori sangat puas.
2. Adapun Faktor yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut antara lain:
 - a. Optimalisasi semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diampu oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Lebih Efektif.
 - c. Penerapan pendekatan teknis dengan kondisi lapangan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lebih tepat sasaran dan efektif.
 - d. Ketersediaan dan kompetensi SDM teknis pelaksana program dan kegiatan.
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana.
 - f. Ketersediaan anggaran.
 - g. Terjalannya kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan (Crosscutting)
 - h. Adanya dukungan kebijakan/regulasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Berdasarkan analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.
 - b. Menghindari penganggaran pekerjaan fisik di anggaran perubahan sebagai antisipasi kondisi alam dan waktu yang sempit dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikhawatirkan tidak selesainya pekerjaan.

Kandangan, 25 Februari 2026



Hj. RAHMAWATY, S.T.,M.T.

NIP. 19710726 199703 2 005

Pembina Utama Muda, IV/c

